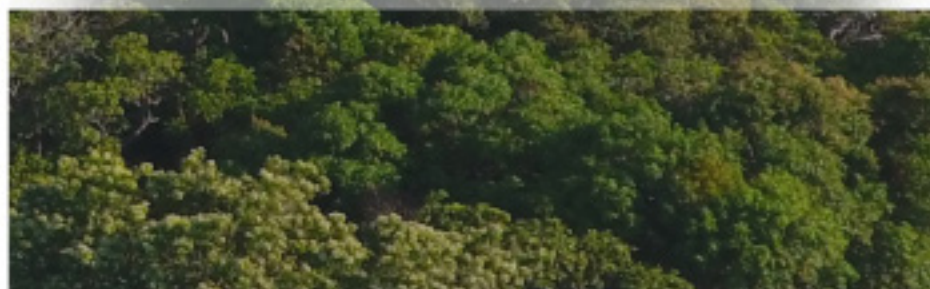




DARI PADANG ILALANG MENJADI HUTAN

"Praktek Kelola Hutan Desa Mattirotasi"



Dari Padang Ilalang Menjadi Hutan

Praktik Kelola Hutan di Desa Mattirotasi

Penulis Naskah:

Sutrisno Absar
Andrew Kresna E
Sairuddin Bae
Andi Tenri Adi

Editor:

Adrayanti Sabar



Balai Perhutanan Sosial
dan Kemitraan Lingkungan
Wilayah Sulawesi



Lembaga Studi Informasi
dan Media Massa

**Diterbitkan Oleh:
Lembaga Studi Informasi dan Media Massa
(eLSIM)**

Dari Padang Ilalang Menjadi Hutan

Praktik Kelola Hutan di Desa Mattirotasi

ISBN:

978-602-97791-1-0

Penulis Naskah:

Sutrisno Absar
Andrew Kresna E
Sairuddin Bae
Andi Tenri Adi

Editor:

Adrayanti Sabar

Tata Letak dan Desain Cover:

Suherman Ahmad & Muh. Ardiansyah

Diterbitkan Oleh:

Lembaga Studi Informasi dan Media Massa (eLSIM)
Jalan A.P. Pettarani IIIC No. 99, Tamamaung, Panakkukang,
Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
Telpon: (0411) 458422
Email: elsim.or.id@gmail.com

Didukung Oleh:

Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
Wilayah Sulawesi

Terbit November 2018

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan bentuk dan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit

Kata Pengantar

Puji syukur saya kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat yang diberikan sehingga Buku Dari Padang Ilalang Menjadi Hutan ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai bahan role model pengelolaan hutan melalui skema Perhutanan Sosial, sekaligus sebagai salah satu bentuk tulisan mengenai keberhasilan program Perhutanan Sosial yang dicanangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia pada Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi.

Buku ini dapat diselesaikan dengan baik tak lepas dari banyaknya pihak yang turut membantu. Sehingga dengan segala kerendahan hati, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Mattirotasi dan Hutan Desa Mattirotasi, maupun dalam penyusunan buku ini. Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan anugerah dan karunia-Nya, sehingga seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Mattirotasi dan Hutan Desa Mattirotasi dapat terus melaksanakan tugasnya, sehingga dapat turut berperan serta dalam keberhasilan program Perhutanan Sosial.

Bili-bili, November 2018
Kepala Balai PSKL Wilayah
Sulawesi

Muckhsin, S.Hut. M.Si.

NIP 19740727 200303 1 003

Kata Pengantar

Puji dan puja kita kirimkan untuk tuhan yang maha esa, karena berkat kuasanya kita mendapatkan begitu banyak anugerah yang dapat dimanfaatkan demi kelangsungan hidup manusia di dunia. Salah satu anugerah yang tuhan berikan kepada manusia untuk dimanfaatkan adalah hutan.

Hutan sebagai rumah bagi beragamnya tanaman, dengan begitu manusia dapat mengelolanya untuk mendapatkan hasil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melihat kondisi tersebut tentu hutan juga memiliki potensi untuk dapat dirusak akibat dari tindakan eksploitasi manusia yang tidak bertanggung jawab.

Pemanasan global akibat dari meningkatnya emisi gas rumah kaca merupakan dampak dari eksploitasi yang kurang bertanggung jawab atas hutan. kutub utara sebagai salah satu dari wilayah yang memiliki suhu terendah di planet ini, telah menjadi saksi betapa buruknya pemanasan global bagi kehidupan manusia yang dimana dari beberapa tahun terakhir jutan balok es telah mencair akibat dari kenaikan suhu permukaan bumi.

Di Indonesia sendiri, dalam kurun waktu dua tahun terakhir ada beberapa daerah mengalami musim kemarau berkepanjangan akibat dari pemanasan global yang menjadikan sungai menampakkan wajah seram akan kekeringan. Sehingga aktivitas pertanian yang menjadi primadona pencaharian bagi sebagian besar masyarakat di daerah pedesaan yang terdampak kemarau berkepanjangan terancam berhenti sebab lahan garapan masyarakat mengalami kekurangan pasokan air.

Fakta-fakta yang menyesakkan dada tersebut hanya dapat diatasi dengan cara memperbaiki metode atau pendekatan manusia dalam pengelolaan hasil hutan. metode yang dihadirkan pemerintah dalam mengelola hasil hutan hari ini telah menunjukkan keseriusan dalam memandang hutan bukan hanya sekedar kawasan yang memiliki manfaat ekonomi semata, melainkan juga hutan sebagai kawasan yang mampu mempertahankan peradaban umat manusia.

Konsep perhutanan sosial yang dibangun oleh pemerintah dengan jargon “hutan lestari, masyarakat sejahtera” mengarahkan masyarakat agar dalam memanfaatkan hasil hutan tetap memikirkan keberlanjutan kawasan hutan itu sendiri sebagai kontributor terbesar dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Hal ini tentu selain memiliki dampak lingkungan, juga memiliki dampak bagi perekonomian masyarakat.

Buku ini; “dari padang ilalang menjadi hutan”, mencoba mengantar kita atau para pembaca sekalian untuk melihat seberapa besar ikatan manusia terhadap hutan, dari segi pemanfaatan secara ekonomi, lingkungan maupun budaya masyarakat yang berada di Desa Mattirotasi kabupaten Sidrap. dengan skema pengelolaan hutan berkelanjutan masyarakat Mattirotasi telah mencoba mengolah hutan mereka dengan memanfaatkan kawasan hutan sebagai lokasi bercocok tanam. Dengan begitu, keberlangsungan perekonomian masyarakat Mattirotasi tetap terbangun dengan tanpa melupakan aspek lingkungan melalui praktik-praktik pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

“Hal baik harus terus disebarakan” begitulah ungkapan yang tepat untuk buku ini kala memotret kesuksesan pengelolaan hutan berkelanjutan di desa Mattirotasi. Adanya cerita baik ini tidak terlepas dari dari dukungan dari Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi.

Terima Kasih dan Selamat Membaca

Makassar, November 2018

Lembaga Studi Informasi dan Media Massa (eLSIM)

“Dari Penulis”

Cerita ini ditulis secara objektif berdasarkan data lapangan yang dikumpulkan selama kurang lebih sebulan. Memotret praktik pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat desa dan peranan parapihak, dari aspek kesejarahan hingga kekiniannya.

Sebuah pembelajaran mengenai keterikatan hutan dan manusia yang tak terlepas dari sosial budaya (Local Wisdom), ekonomi (Strategi usaha hasil hutan) dan Ekologi (Keberlanjutan lingkungan).

Salam hangat,

Tim Penulis

“DAFTAR ISI”

Kata Pengantar

- Bagian I*** : Desa Mattirotassi: Perpaduan Wangi
Angin dan Mete — **1**
- Bagian II*** : Masyarakat dalam Upaya-upaya Pengelolaan Hutan
Berkelanjutan — **7**
- Bagian III*** : Dari Padang Ilalang Menjadi Hutan — **13**
- Bagian IV*** : Hak Akses Atas Hutan — **25**
- Bagian V*** : Pengelolaan Agroforestry Kawasan Hutan
Pabbaressengeng — **33**
- Bagian VI*** : Jambu Mete, Sebuah pilihan menuju
kesejahteraan? — **39**
- Bagian VII*** : Menangkap Peluang Bisnis Jambu Mete melalui
“Mete Krispy” — **47**
- Bagian VIII*** : Suatu Akhir yang Memulai — **53**

BAGIAN I

Desa Mattirotasi: "Perpaduan Wangi Angin dan Mete"

“Merupakan desa tertinggal, tak menjadikan pemerintah dan masyarakat pasrah akan kondisi tersebut, beragam upaya dilakukan hingga “aji mumpung” Pembangunan PLTB pertama di Indonesia menjadi semangat baru untuk berkembang di tengah banjir perhatian.”

Batas Kota Parepare dan Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi titik awal Desa Mattirotasi, Kecamatan Watang Pulu. Gugusan gunung yang terhias baling-baling raksasa ke arah tenggara dan panorama laut Parepare ke arah barat menjadi paket pemandangan indah yang tersuguhkan. Penamaan Desa Mattirotasi memang tidak terlepas dari pengertiannya dalam Bahasa bugis, “Mattirotasi” artinya memandang (dari kejauhan) dan “tasi” artinya laut, jadi Mattirotasi adalah memandang laut dari jauh.

Merupakan salah satu desa administratif di Kabupaten Sidrap yang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil beras terbesar di Sulawesi Selatan. Kondisi tersebut menjadikan Desa Mattirotasi dengan lahan sawah yang cenderung sedikit dan bergantung pada musim hujan bahkan hasil panen cenderung hanya untuk kebutuhan rumah tangga, menjadi luput dari perhatian untuk prospek pertanian¹. Tidak hanya itu, jejeran batu gunung dan lahan kering serta curah hujan yang cukup rendah menjadi faktor alam yang memengaruhi hasil pertanian masyarakat.

Menelusuri lebih dalam wilayah desa, tampak lahan kering tandus berisi rumput dan bebatuan di hampir sepanjang jalan datar. Hempasan angin semakin kencang kala menanjak ke wilayah perbukitan, seakan salam sambutan telah memasuki wilayahnya. Amin, salah satu tokoh penggerak desa, menceritakan bagaimana kondisi alam desanya hingga masalah sosial ekonomi masyarakat.

“di sini sangat tandus, cuma rumput dan batu-batu yang bisa dikerjakan sama masyarakat, makanya banyak masyarakat keluar desa, merantau, jadi supir truk. Pokoknya di sini kering, makanya termasuk desa tertinggal” ungkap Amin yang saat ini diamanahkan sebagai ketua BUM-Des Mattirotasi.

Setiap makhluk hidup memiliki daya adaptasi yang berbeda-beda untuk terus bertahan hidup di tengah segala kondisi, tak terkecuali manusia. Beragam pekerjaan silih berganti digeluti oleh masyarakat Desa dengan jumlah penduduk 2.279 jiwa ini. Tak jarang proses adaptasi tersebut hanya membawa pada ranah subsisten.

¹ Luas lahan sawah 66,66 ha (hanya tadah hujan) atau hanya 1,96 % dari total luas wilayah desa yang mencapai 34,06 km² (Sumber: BPS tahun 2018)

Sambil sesekali memantau ponselnya, pemuda bersawo matang ini menjelaskan deretan pekerjaan masyarakat, mulai dari petani sawah, pengumpul dan pengrajin batu, beternak, kuli bangunan, supir truk dan godaan merantau serta masih banyak lagi yang menjadi deretan aktivitas masyarakat dalam menghidupi keluarga.

Pria yang juga bekerja di PLTB tersebut juga menuturkan bahwa dirinya pun sempat bekerja di Jepang selama 2 tahun. Tetapi dari pengalaman kerja di luar negeri tersebut menjadikan pria berusia 35 tahun itu memantapkan diri untuk pulang membangun desanya.

“pernah saya bekerja di Jepang, di salah satu perusahaan di sana, betul-betul maju negaranya orang. Makanya setelah pulang saya bertekad, siapa lagi yang mau bangun desa kalo bukan kita orang desa yang sadar, ditambah dengan adanya PLTB. Saya yakin prospek di sini sangat baik untuk kesejahteraan masyarakat, tinggal bagaimana kita pintar-pintar tempatkan diri” ungkap Amin kala menceritakan pengalaman dan semangatnya membangun desa.

Setidaknya dalam 10 tahun terakhir, Ada dua momen besar yang sedikit banyak mengubah hidup masyarakat desa yang berjarak 15 km dari ibu kota kabupaten ini, yakni bergulirnya program pemerintah untuk melegalkan aktivitas masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan, dengan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan skema Hutan Kemasyarakatan yang terbit pada tahun 2012 dan Hutan Desa yang terbit pada tahun 2015². Walaupun pada dasarnya, sebelum adanya program perhutanan sosial ini, sebagian masyarakat sudah cukup aktif memanfaatkan hasil hutan atas dasar turun temurun dari nenek moyang mereka dan sebagai mata pencaharian utama. Hingga pada akhirnya perhutanan sosial ini telah menjadi dorongan untuk memaksimalkan pengelolaan di dalam kawasan hutan. Komoditi mete dan kunyit akhirnya dipilih sebagai komoditi unggulan yang bernilai ekonomi dan tetap mengindahkan keberlanjutan lingkungan melalui tanaman kayu-kayuan lainnya seperti Jati (akan tersaji secara detail pada bahasan selanjutnya).

² Saat ini dikenal sebagai Program Perhutanan Sosial dengan 5 Skema yakni Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. (P.83 tahun 2016)

Dengan akses legal tersebut, pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat berjalan secara intensif. Alhasil, Desa Mattirotasi dikenal sebagai desa penghasil mete terbaik. Tidak jarang ber-ton ton mete datang dari luar kabupaten lain kemudian terjual dengan nama Mete Mattirotasi.

Jumardi, salah satu ketua kelompok tani hutan menjelaskan bagaimana mete dulunya hanya terbuang, tidak ada harga sama sekali. Baru kemudian pada awal tahun 2000-an, beberapa pembeli masuk ke desa. Kondisi tersebut menurutnya banyak merubah kehidupan masyarakat dengan beralih ke mete. Bahkan beberapa tahun terakhir, pembeli mancanegara sudah berbondong-bondong masuk ke desa, terutama dari India dan Cina.



sumber:eLSIM Doc.

“susah kita hitung berapa sebenarnya produksi mete di sini, karena mete mattirotasi sudah terkenal bagus kualitasnya, setiap tahun banyak mete dari luar masuk ke sini dijual sama pengepul, diklaim sebagai mete mattirotasi” tutur Jumardi

Pria berusia 49 tahun tersebut juga kebingungan mengapa mete

mattirotasi memiliki kualitas lebih dibanding daerah lain. Mereka hanya mengupayakan perawatan mete di tengah kondisi alam, belajar dari pengalaman nenek moyang. Tak jarang kegagalan juga turut menghampiri.

“mungkin karena kondisi alam yang kering dan curah hujan rendah cocok dengan iklim yang dibutuhkan tanaman mete, padahal kita tidak pernah membayangkan bisa seperti ini. Cuma belajar dari pengalaman, seperti jarak tanam, mete kalo terlalu dekat akan berbuah sedikit” ujar pria yang pernah menjadi supir truk ini sebelum didapuk menjadi ketua KTH Sipatuo II.

Bagaikan penemuan harta karung di tengah kondisi alam yang dulunya banyak dikeluhkan oleh masyarakat, saat ini membawa perubahan kesejahteraan masyarakat melalui komoditi ekspor yang diburu pasar internasional. Maka tak heran Desa Mattirotasi dikenal sebagai Desa Mete.

Momen kedua yang turut berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat adalah masuknya pemanfaatan angin untuk pembangkit listrik yang dikelola oleh PT. UPC Sidrap Bayu Energi dengan tagline Renewable Energy. Kecepatan angin yang bisa mencapai 7 meter perdetik kerap dikeluhkan oleh masyarakat, karena berdampak pada aktivitas basis lahan, mulai dari gagal panen hingga deretan peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang membawa kerugian. Melalui penelitian dan persiapan dilakukan sejak tahun 2012, berbuah manis dengan peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Bayu pertama di Indonesia pada tanggal 2 Juli 2018 oleh Presiden Jokowi. “Kebun Angin” hadir di tengah titik jenuh eksploitasi bahan baku fosil.

Sontak kondisi tersebut menjadi titik balik menuju kesejahteraan masyarakat desa dalam pemanfaatan sumber daya alam.

“siapa yang menyangka akan ada PLTB di sini, kencangnya angin tidak jarang sering dikeluhkan oleh masyarakat karena membuat calon buah mete sudah gugur sebelum besar dan sering terjadi kebakaran. Jadi manfaatnya bukan cuma dijadikan sebagai pegawai perusahaan tetapi banyak potensi pengembangan lainnya, seperti wisata kincir, itu yang sementara kita godok” ungkap Amin yang juga diamanahkan sebagai Communi-

ty & Relations Officer PT UPC Sidrap Bayu Energi.

Mendadak Desa Mattirotasi menjadi perhatian melalui pembangunan Pembangkit listrik tenaga angin pertama di Indonesia. Silih berganti pejabat tinggi negara berdatangan dan terkesan, hingga pada akhirnya presiden Jokowi dalam sambutan peresmian mengatakan serasa berada di negeri Belanda. Desa yang dulunya tertinggal, saat ini dikenal sebagai negeri belanda yang memiliki peran vital sebagai pemasok listrik dengan kapasitas 70 Megawatt.

“Berada di Perbukitan Watang Pulu, sore tadi, saya merasa seperti tengah di negeri Belanda seperti di Eropa” Ungkap Presiden Jokowi saat peresmian PLTB di Desa Mattirotasi ³”

Mete dan Angin adalah 2 (dua) hal yang dulunya dianggap tak bernilai kini menjadi perhatian hingga mancanegara. Pedagang besar Cina dan India berbondong-bondong dan berebut produksi mete petani. Strategi pemasaran, perawatan intensif dan act by experience and local wisdom petani adalah langkah yang tidak lagi sekedar subsisten. Dari angin yang kerap dikeluhkan dan wangi asap kebakaran yang terjadi setiap tahunnya kini berubah menjadi wangi angin kesejahteraan masyarakat. Tak ada takdir yang harus dikeluhkan, usaha dan kesabaran-lah yang harus ditunjukkan.

Masyarakat Sejahtera Hutan Lestari

³ Dikutip dari laman <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/02/200800826/resmi-kan-pltb-sidrap-jokowi-merasa-seperti-di-belanda>

BAGIAN II

Perhutanan Sosial: Masyarakat dalam Upaya-Upaya Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

“
"Bumi, Air, dan kekayaan alam yang terkandung di-
dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" ayat 3 pasal
33 UUD 1945
”

Pembangunan hutan era orde baru didominasi dengan rezim indus-trialisasi, dimana pemanfaatan hutan diperuntukan untuk izin-izin perusahaan, baik untuk hasil hutan, perkebunan bahkan pertamban-gan. Maka tak heran salah satu sumber pendapatan negara terbesar pada masa itu adalah sektor kehutanan melalui eksploitasi berlebihan untuk kepentingan ekonomi.

Namun, dibalik kedigdayaan ekonomi masa itu menyisakan luka terhadap potret hutan Indonesia sebagai paru-paru dunia. Menurut lapo-ran penelitian yang dilakukan oleh Forest Watch Indonesia (FWI) pada tahun 2001⁴, eksploitasi tersebut berdampak pada kehancuran kawasan hutan/deforestasi dan ketimpangan pengelolaan antara masyarakat dan perusahaan.

Tahun 1970-an menjadi titik awal penebangan hutan secara komersial dan tahun 1980-an laju deforestasi Indonesia telah mencapai 1 juta ha/tahun, kemudian meningkat sekitar 1,7 juta ha/tahun, dan tahun 1996 bahkan mencapai 2 juta ha/tahun.

Dari aspek sosial kemasyarakatan, masyarakat yang telah lama menggantungkan hidup atas kawasan hutan perlahan tergeser akibat masuknya konsesi perusahaan-perusahaan eksploitasi. Akibatnya kemi-skinan dan konflik tenurial adalah potret permasalahan yang selalu dile-katkan dengan kawasan hutan.

Sejumlah data telah tersaji untuk menggambarkan bagaimana kemiskinan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan. Data PODES SE tahun 2006, jumlah penduduk miskin di dalam kawasan hutan sekitar 5 juta jiwa. Angka yang lebih tinggi ditunjukkan T Brown (2004) dalam Analysis of Population and Poverty in Indonesia's Forest, diperkirakan ada sekitar 48,8 juta penduduk tinggal di dalam hutan nega-ra. Dari jumlah tersebut, sekitar 9,8 juta jiwa dikategorikan miskin⁵.

Selain itu, data yang lebih besar ditunjukkan oleh kertas kerja Centre For Economic and Social Studies (CESSS) yang didasarkan pada

⁴ Forest Watch Indonesia, Silang Sengkarut Pengelolaan Hutan dan Lahan Di Indonesia, 2017 Hal. 3.

⁵ Muhammad Ridha, dkk, Konteks Perjuangan Akses Legal Atas Hutan di Sulawe-si (Makassar: Sulawesi Community Foundation, 2016) Hal.2Hal. 3.

data PODES dan SUSENAS serta data BKKBN yang menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin di desa-desa dalam dan sekitar hutan lebih besar dibandingkan jumlah penduduk miskin diluar hutan. dari Analisa dan perkiraan tersebut diperkirakan 50% penduduk miskin dari 32 juta jiwa penduduk miskin Indonesia berada di dalam dan sekitar kawasan hutan (Gutomo Bayu Aji, Dkk: 2011).

Memasuki era reformasi, babak baru pembangunan kawasan hutan dimulai. Mainstreaming masyarakat untuk keadilan pemanfaatan sumber daya hutan ditandai dengan terbitnya Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dasar hukum tersebut menjelaskan bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan keberlanjutan. Aturan baru tersebut mengembalikan fitrah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 dimana Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Keduanya menegaskan arah penyelenggaraan negara yang menganut paham negara kesejahteraan (welfare state). Dalam paham kesejahteraan, negara turut campur tangan dan berperan dalam aktivitas perekonomian untuk mencapai kemakmuran rakyat (Jurnal Konstitusi, 2010).⁶

Dalam rentang waktu yang berdekatan dengan lahirnya UU No.41 Tahun 1999 tersebut, isu pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan telah digalakkan melalui konsep kehutanan masyarakat. Pada fase awal implementasinya, konsep tersebut dikemas dalam Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang berfokus untuk rehabilitasi hutan dengan pelibatan masyarakat⁷. Praktik pelibatan masyarakat pada fase tersebut tidak lebih hanya sebatas tenaga kerja (sistem upah proyek).

Di Sulawesi Selatan, HKm sebagai pilot project berlangsung di beberapa kabupaten salah satunya adalah Kabupaten Sidenreng Rappang, Desa Mattirotasi Kecamatan Watang Pulu. Pemilihan lokasi lebih didasarkan pada kondisi tutupan hutan yang tidak lagi berfungsi sebagaimana hutan dan eksistensi masyarakat dalam mengelola kawasan hutan.

⁶ Loc.cit

⁷ Kepmen 677 tahun 1999 dan SK Menhut No.865/Kpts-II/1999

Pada pelaksanaannya, banyak masyarakat yang menyangsikan program hutan kemasyarakatan ini, anggapannya adalah sama seperti proyek reboisasi tahun-tahun sebelumnya yang hampir bergulir setiap tahunnya tanpa ada kejelasan pasca proyek. Rusdiansyah, selaku pendamping lokal LSM pelaksana proyek turut membangun dan mengorganisir masyarakat untuk terlibat. Pria paruh baya ini mencoba memutar ulang memori perjuangannya kala itu mengajak masyarakat baik yang telah eksis mengelola kawasan hutan maupun yang belum pernah sama sekali⁸.

“Kegagalan proyek reboisasi tahun-tahun sebelumnya menjadi tantangan penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan tahun 1999” Rusdiansyah



sumber:eLSIM Doc.

Niat menuju perubahan yang lebih baik, tidak terlepas dari “miss” pada bagian-bagian tertentu, seperti halnya pilot project HKm tahun 1999. Secara konseptual HKm mengupayakan pelibatan bersama masyarakat dalam pembangunan kawasan hutan, tetapi belum mengindahkan praktik atau pengalaman masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan dan belum adanya kepastian legal masyarakat dalam mengelola kawasan

⁸ Akan tersaji pada bagian “Dari padan ilalang menjadi hutan” dalam buku ini

hutan pasca proyek.

Pembenahan aturan mengenai kehutanan masyarakat (baca: Hutan Kemasyarakatan) terus dilakukan, ditandai dengan terbitnya peraturan pemerintah No.6 tahun 2007 dan Peraturan Meteri Kehutanan No. 37 tahun 2007. Dalam aturan tersebut mengatur tentang jangka waktu pengelolaan HKm selama 35 tahun dan dapat diperpanjang. Hal tersebut mengindikasikan keseriusan pemerintah dalam menjamin kepastian hak kelola masyarakat di dalam kawasan hutan.

Namun dalam laporan penelusuran Arya Ahsani T. (2013), polemik ditingkat masyarakat pun berkembang terkait pemanfaatan hasil hutan kayu pada wilayah HKm. Karena dalam klausul peraturan pemerintah tersebut menyebutkan bahwa penebangan hanya boleh dilakukan terhadap kayu yang berasal dari hasil penanaman masyarakat. Dengan skema proyek rehabilitasi yang mendahului, tentunya hampir diseluruh wilayah pilot project HKm, masyarakat hanya akan “gigit jari”. Identifikasi siapa yang menanam merupakan akar permasalahannya, karena di beberapa tempat masyarakat telah eksis melakukan penanaman pohon, seperti yang dijelaskan oleh Ilham (masyarakat anggota HKm Desa Mattirotasi) kala menunjukkan pohon jati yang kira-kira telah berusia 30 tahun yang menurutnya ditanam oleh orangtuanya dulu. Ilham kemudian menambahkan bahwa bagaimana peran masyarakat dengan pengalaman dan kearifan lokalnya dalam mengelola kawasan hutan adalah kunci keberhasilan rehabilitasi, karena menurutnya standar penanaman dari pemerintah tidak sesuai dengan kondisi lahan.⁹

Berlakunya Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, sedikit banyak merubah wajah otoritas yang berwenang terhadap kawasan hutan. Dari kewenangan kabupaten/kota kemudian dikembalikan ke pemerintah pusat dan provinsi. Penyempurnaan terhadap konsep kehutanan masyarakat pun dilakukan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial.

Nafas baru pengelolaan hutan oleh masyarakat tertuang dalam peraturan tersebut, mengatasi ketimpangan pengelolaan hutan antara

⁹ Akan tersaji pada bagian “Dari padan ilalang menjadi hutan” dalam buku ini

masyarakat dan perusahaan dengan menargetkan izin pengelolaan hutan oleh masyarakat seluas 12,7 juta Ha. selain sebagai resolusi konflik tenu-rial, kebijakan ini juga berupaya mengurangi angka kemiskinan masyarakat didalam dan sekitar hutan melalui usaha hasil hutan yang tetap mengin-dahkan kelestarian lingkungan.

BAGIAN III

Dari Padang Ilalang menjadi Hutan

“Kawasan Hutan Mattirotasi merupakan kawasan hutan produksi dengan luas 970,22 Ha yang masing-masing terdiri dari 14 Kelompok Tani Hutan (KTH) dengan total luas 755,22 Ha dan 1 Hutan Desa (HD) dengan Luas 215 Ha. Kawasan ini terletak di Desa Mattirotasi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan.

”

Kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Mattirotasi ditetapkan pada tanggal 9 Desember 2010 berdasarkan SK 679/Menhut-II/2010 yang menetapkan luas Areal Kerja HKm Mattirotasi. Penetapan tersebut menjadikan kawasan ini merupakan satu-satunya kawasan HKm di Kabupaten Sidenreng Rappang dan merupakan satu dari tujuh kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan HKm di Sulawesi Selatan.

Kawasan HKm Mattirotasi dikelola oleh 14 Kelompok Tani Hutan (KTH) yang bekerja berdasarkan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) yang ditetapkan berdasarkan keputusan bupati yang terbit pada 11 November 2012.

Keberagaman tanaman pada kawasan HKm Mattirotasi didominasi oleh sekitar 70% tanaman jati yang merupakan jenis tanaman kayu, serta sekitar 30% oleh tanaman bukan kayu seperti jambu mete dan kemiri, serta tanaman sela lainnya seperti jagung dan kunyit. Dengan keberagaman tanaman yang telah tumbuh di kawasan ini merupakan suatu harapan untuk terciptanya ekosistem lingkungan yang berkelanjutan.

Model penanaman tersebut sebenarnya menjadi aturan dalam pengelolaan kawasan HKm. Rusdyamzah salah satu pendamping pada pelaksanaan pilot *project* HKm pada masa itu, menuturkan bahwa “dia mengajak masyarakat agar memanfaatkan aturan yang menjelaskan jumlah tanaman yang hasilnya bukan kayu sebanyak 30% agar ditanami dengan tanaman MPTS yakni jambu mete. Itulah sebab sehingga hari ini dapat disaksikan bahwa jambu mete merupakan tanaman primadona dari desa Mattirotasi.

Kondisi lahan di wilayah HKm Mattirotasi yang kering serta memiliki curah hujan yang rendah menjadi peluang tersendiri untuk tanaman jambu mete tumbuh subur, sebab tanaman jambu mete merupakan tanaman yang dapat tumbuh baik di lahan kritis dan beriklim kering. Keharusan penggunaan jarak tanam yang cukup lebar pada tanaman jambu mete membuat para petani dapat memanfaatkan potensi ruang yang ada diantaranya, dengan menanam berbagai jenis tanaman sela seperti jagung, kunyit dan kacang-kacangan.

Keberagaman hasil hutan bukan kayu yang dapat dimanfaatkan

telah menjadi anugerah bagi masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan ini. Namun anugerah tersebut tidak hadir begitu saja dalam kehidupan masyarakat Mattirotasi. Dibutuhkan berbagai usaha keras untuk mengubah kawasan yang dulunya merupakan lahan kritis yang hanya dipenuhi oleh bebatuan dan padang ilalang menjadi kawasan perhutanan hijau, yang dapat mendukung ekosistem dan perekonomian masyarakat sekitar.

Padang Ilalang dan Malapetaka Kebakaran Lahan

Sebelum menjadi wilayah HKm, kawasan ini merupakan area hamparan bukit yang dipenuhi dengan bebatuan dan padang rumput ilalang. Kondisi tersebut merupakan surga bagi hewan-hewan ternak untuk berkembang biak, salah satunya adalah bagi sapi ternak.



sumber:eLSIM Doc.

Pemanfaatan rumput sebagai lahan ternak oleh para pengusaha ternak dengan menggunakan skema HGU (Hak Guna Usaha) bukan merupakan skema yang menguntungkan secara ekologi dan tidak begitu menguntungkan pula secara ekonomi bagi masyarakat setempat dan sekitar. Sebab, dominasi pengusaha-pengusaha ternak dalam akses pemanfaatan

lahan menyebabkan masyarakat sekitar tak mendapatkan apa-apa dari kawasan ini selain bekerja sebagai buruh ternak dan buruh pemecah batu. Selanjutnya, kondisi yang tidak sama sekali menguntungkan bahkan dapat dikatakan merugikan bagi masyarakat sekitar yaitu kondisi lingkungan yang seringkali dipenuhi polusi udara yang disebabkan oleh kebarakan hutan yang sering kali terjadi pada masa itu.

Pada masa itu perbukitan Mattirotasi merupakan wilayah yang seringkali terkena dampak kebakaran lahan. Kondisi lahan pada masa itu berpotensi menciptakan musibah kebakaran lahan, sebab mayoritas lahan pada kawasan ini ditumbuhi oleh ilalang yang pada satu sisi dapat menjadi malapetaka karena berpotensi menjadi bahan bakar pada kasus kebakaran hutan. Kecepatan angin yang begitu cepat juga membuat wilayah ini begitu sulit terhindar dari musibah kebakaran hutan. Tiupan angin yang kencang dapat membuat api dengan cepat menyebar dari satu lahan menuju beberapa lahan sehingga menimbulkan kebakaran yang besar.

Menurut masyarakat sekitar kebakaran hutan merupakan peristiwa yang disebabkan oleh kesengajaan maupun kelalaian pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap pemanfaatan kawasan padang ilalang. Pihak-pihak yang dimaksud adalah mereka yang ingin membersihkan rumput untuk areal pertanian ketika memasuki musim hujan dengan menggunakan metode pembakaran sebagai cara yang paling efektif dan efisien untuk menghilangkan rumput ilalang.

Peristiwa ini berlangsung selama bertahun-tahun dikawasan ini, masyarakat sekitar mengistilahkan “setiap tahun sebelum memasuki hari peringatan kemerdekaan bukit-bukit di wilayah Mattirotasi seluruhnya seperti telah di *cat hitam*”. Istilah *cat hitam* mengacu pada kondisi perbukitan yang pada waktu itu memang berwarna hitam dikarenakan habis terlahap api sehingga hanya menyisakan abu hitam dari padang ilalang.

Uji Coba Kehutanan Masyarakat Tahun 1999

Kebijakan HKm pertama kali dikeluarkan pada tahun 1995 melalui penerbitan Kepmenhut No.622/Kpts-III/1995. Kebijakan ini memberi peran kepada Dirjen Pemanfaatan Hutan yang didukung oleh para LSM,

Universitas dan Lembaga Internasional untuk merancang dan melaksanakan berbagai proyek uji coba di berbagai lahan. Pada tahun 1999, kawasan perbukitan yang berada di Desa Mattirotasi ditunjuk sebagai kawasan uji coba konsesi hutan yang melibatkan masyarakat setempat. Dengan menggandeng LSM Agrobitema, OECF (Overseas Economic Cooperation Fund) dan Universitas Hasanuddin sebagai pelaksana proyek uji coba ini.

Menurut Muharam, yang menjabat sebagai sekretaris LSM Agrobitema pada masa itu bahwa penetapan Mattirotasi sebagai proyek uji coba konsesi hutan pada disebabkan oleh dua faktor. Faktor pertama adalah faktor lingkungan Mattirotasi yang seringkali mengalami kebakaran hutan yang menciptakan polusi udara yang berlebihan sehingga dianggap sangat mengganggu pemukiman masyarakat sekitar dan bahkan sampai menyeberang ke Kota Parepare. Faktor kedua adalah faktor sosial ekonomi masyarakat Mattirotasi yang begitu terbelakang secara ekonomi sehingga dengan menghidupkan hutan di kawasan ini diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Mattirotasi demi memperbaiki kondisi kesejahteraan masyarakat.

Secara umum harapan utama yang ingin dicapai dari penerapan proyek uji coba ini adalah mengubah lahan kritis padang ilalang yang kerap kali meresahkan masyarakat akibat polusi udara yang disebabkan oleh kebakaran menjadi hamparan hutan hijau yang dikelola masyarakat. Tetapi fakta yang terjadi dilapangan saat beberapa tahun awal penerapan proyek ini adalah kebakaran hutan masih saja berlangsung meskipun telah ada upaya untuk mengganti tanaman ilalang dengan menanam bibit kayu dan bibit MPTS (Multi Purpose Tree Spesies) seperti jambu mete.

Fakta yang terjadi di atas menurut Jumardi yang merupakan salah satu Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) setempat disebabkan oleh “kurangnya komitmen dari penyelenggara itu sendiri”. Dengan artian bahwa tidak ada komitmen yang begitu serius dari penyelenggara untuk sungguh-sungguh menghijaukan kawasan yang berada di desa Mattirotasi. Penyelenggara terkesan tidak serius karena melakukan proses menanam yang secara serabutan atau seperti yang di ungkapkan Jumardi “penyelenggara pada waktu itu cuman suruh kita menanam selepas itu tidak ada

pendampingan atau pengarahan untuk menjaga tanaman. Istilahnya itu mereka cuman tau tanam lalu tinggalkan. Mereka beranggapan kalau ini kawasan bisa hijau dengan sendirinya dengan cara begitu”.

Selain kurangnya komitmen penyelenggara pada waktu itu, salah satu penyebab proyek ini tidak berjalan dengan maksimal ialah bentuk pelibatan masyarakat dalam proyek ini. Bentuk pelibatan masyarakat pada proyek ini ialah dengan memperlakukan masyarakat setempat sebagai pekerja tanam, dengan memberi bibit dan upah tanam kepada masyarakat. Model pelibatan seperti ini menimbulkan cara pandang tersendiri bagi masyarakat. Masyarakat beranggapan bahwa mereka hanya bertindak sebagai pekerja kasar yang diberi upah untuk menanam dan hasil tanamnya nanti adalah milik pemerintah karena bertindak layaknya majikan yang memberi upah tanam mereka.

Cara pandang ini berimplikasi pada kurangnya rasa kepemilikan masyarakat terhadap lahan tempat mereka menanam sehingga masyarakat tidak bersikap begitu peduli untuk merawat dan menjaga lahan-lahan yang telah ditamani.

Kurangnya peran aktif masyarakat dalam memelihara lahan yang telah digarap menyebabkan masalah kebakaran hutan di wilayah Mattirotasi menjadi musibah yang belum dapat terhindarkan.

Masyarakat sebagai jawaban kegagalan hari kemarin

Pada tahun 2001, pemerintah mengeluarkan Keputusan Meteri No.31/Kpts-II/2001, yang memberikan keleluasaan lebih besar kepada masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan hutan. Kebijakan ini merubah bentuk pelibatan masyarakat pada pengelolaan hutan yang sebelumnya masyarakat hanya dilibatkan sebagai pekerja yang diberi upah untuk menanam. Kebijakan ini membangun sebuah konsep baru tentang pengelolaan hutan dengan memberi uji coba akses penguasaan lahan kepada masyarakat. Uji coba akses penguasaan lahan oleh masyarakat diselenggarakan dengan menginisiasi pembentukan kelompok tani hutan (KTH) di masing-masing HKm yang kemudian akan diberikan kesempatan untuk mengelola lahan secara mandiri.

Kesempatan pemanfaatan lahan hanya dapat diperoleh dengan

mendaftarkan diri sebagai anggota di salah satu KTH yang ada. KTH merupakan badan pengelola hutan yang bertugas untuk mengorganisasikan para anggota petani dan lahan-lahan yang berada di bawah naungannya. Luas lahan yang diberikan kepada masing-masing KTH kemudian dibagi secara merata kepada para anggota kelompok petani yang telah terdaftar untuk dikelola secara aktif.



sumber:eLSIM Doc.

Pelibatan masyarakat dengan pembentukan Kelompok Tani Hutan di 14 Kawasan Hutan Mattirotasi tidak begitu saja mampu meningkatkan antusias masyarakat terhadap proyek uji-coba ini. Sekalipun masyarakat begitu antusias mendaftarkan diri sebagai anggota ke masing-masing KTH, namun secara esensial mayoritas anggota yang terdaftar tidak begitu serius menggarap lahan yang telah diberikan. Hal tersebut diungkapkan oleh Rusdyamzah ialah satu dari tiga penyuluh pendamping dari BPDAS pada masa itu, “awalnya mereka itu banyak yang mendaftar lalu tanam bibit jati di lahannya habis itu mereka tinggalkan mi”.

Ketidaktifan para anggota kelompok dalam mengurus lahannya masing-masing menyebabkan pada musim kemarau masalah kebakaran hutan masih saja terjadi.

Lahan-lahan yang rentan terbakar pada umumnya merupakan lahan-lahan yang tak diurus oleh petaninya. Para petani yang tidak begitu

aktif mengurus lahannya, biasanya hanya menanam bibit lalu kemudian meninggalkan lahannya begitu saja, tak ada upaya untuk memelihara termasuk upaya untuk mencari cara untuk mencegah api tak masuk membakar lahannya.

Salah satu penyebab ketidak-aktifan masyarakat dalam menggarap lahan pada waktu itu ialah masih adanya sikap ragu dari masyarakat terhadap program ini. Kebanyakan masyarakat masih belum yakin bahwa program ini mampu memberikan mereka penghidupan yang lebih baik melalui pemanfaatan lahan dan pemungutan hasil hutan. Jumardi mengungkapkan bahwa “orang-orang itu banyak bilang kalau Hkm itu sama *ji* dengan proyek yang lalu-lalu, namanya *ji* berubah”.

Pada masa itu masyarakat mendapat himbauan jika mereka berhasil menggarap lahan yang diberikan, mereka akan diberi ijin pemanfaatan lahan selama 35 tahun oleh pemerintah, namun himbauan tersebut tidak juga membuat masyarakat menjadi antusias untuk berperan aktif mengurus lahan.

Dibutuhkan strategi yang mutakhir untuk menyelesaikan persoalan kebakaran hutan yang masih saja terjadi di kawasan ini. Dibutuhkan keaktifan masyarakat yang mampu bekerja maksimal baik secara individu maupun bekerjasama secara berkelompok untuk dapat mengubah padang ilalang yang rentan terbakar ini menjadi kawasan hutan yang hijau dan sejalan dengan prinsip “masyarakat sejahterahutan lestari”.

Sebagai penyuluh pendamping pada masa itu, Rusdyamzah menerapkan aturan yang ketat di tataran kelompok-kelompok yang dibinanya. Salah satu aturan yang diupayakan Rusdyamzah ialah menerapkan aturan tentang masa wajib pengelolaan hutan, dengan memberi ketentuan bahwa “jika ada yang tidak mengurus secara aktif lahannya selama enam bulan, kami beri teguran dan enam bulan selanjutnya masih begitu saja, mohon maaf kami akan keluarkan dari kelompok”.

Penerapan aturan ini pada mulanya menciptakan konflik di masing-masing KTH. Begitu banyak anggota yang menentang aturan ini. Namun ia tetap memberlakukan aturan secara tegas dan tidak membedakan satu sama lain. Bahkan pada saat itu Kepala Desa Mattirotasi harus

ia dikeluarkan karena bertindak tidak sejalan dengan aturan, yaitu tidak aktif menggarap lahannya selama enam bulan. Menurutnya beberapa anggota yang tidak aktif dan kemudian dikeluarkan merupakan orang-orang yang hanya ingin menerima hasil namun tidak bekerja keras, selain itu anggota masih dihantui oleh perasaan ragu akan manfaat secara ekonomi yang dapat diperoleh dari praktik pengelolaan tersebut, mengingat begitu banyak kegagalan yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

Selain itu ia juga mengungkapkan bahwa salah satu alasan bahwa anggota kurang begitu aktif disebabkan belum begitu mendukungnya fasilitas jalan menuju ke lokasi mereka sehingga tidak memudahkan bagi anggota untuk sering datang mengunjungi lahannya. Namun ia beranggapan bahwa tidak ada jalan lain untuk keluar dari masalah ini, selain aktif untuk menjaga dan merawat mereka masing-masing.

Sikap yang berbeda ditunjukkan oleh Jumardi yang pada masa itu berstatus sebagai anggota pengganti. Pada tahun 2002 Jumardi masuk sebagai anggota di KTH Sipatuo II yang pada saat itu ditinggalkan oleh beberapa anggotanya. Jumardi yang sebelumnya bekerja sebagai supir truck pada waktu memilih bersikap untuk fokus menggarap lahan dan perlahan-lahan meninggalkan pekerjaannya sebagai supir truck. Berdasarkan keterangan yang diperoleh bahwa alasan mengapa Jumardi begitu antusias dalam mengelola lahan ialah karena ia memiliki keyakinan akan manfaat yang akan diperoleh dari aktivitas bercocok tanam tersebut.

Keyakinan tersebut tidak hadir begitu saja dalam benak Jumardi. Ia bercerita bahwa keyakinan tersebut datang dari penyuluh pendamping serta LSM Agrobotama yang seringkali datang memberi dukungan dan motivasi kepada para petani pada waktu itu.

Sebagai penyuluh pendamping pada masa itu, Rusdyamzah bercerita bahwa ia pada saat itu ada tiga penyuluh pendamping di wilayah ini. Namun hingga saat ini hanya ia yang masih bertahan. Alasan mengapa ia masih aktif untuk memberi pendampingan kepada anggota hingga saat ini ialah sikap peduli kepada wilayah HKm ini, yang sebenarnya ialah kampung halamannya sendiri. Berbeda dengan penyuluh-penyuluh lain yang berasal dari luar Mattirotasi, mereka sudah tidak aktif untuk berkunjung

memberi pendampingan kepada masyarakat.

Baginya salah satu kunci keberhasilan jika ingin mendampingi masyarakat ialah penyuluh harus memiliki dua peran, yakni menjadi aparat pemerintah dan menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Rusdyamzah mengungkapkan bahwa terkadang ia harus bertindak untuk melawan ketentuan-ketentuan yang diturunkan oleh pemerintah yang tidak sejalan dengan kondisi lapangan sehingga ketentuan-ketentuan tersebut justru malah merugikan masyarakat. Sikap tersebut ia terapkan ketika masyarakat merasa kurang diuntungkan jika jarak tanam yang diterapkan pada saat itu mengikuti ketentuan pemerintah yakni 400 bibit pohon dalam satu hektar, masyarakat menganggap bahwa tanaman jambu mete tidak dapat berbuah subur jika ditanam dengan jarak tanam berdekatan dikarenakan pada saat tumbuhan ini telah bertumbuh besar, maka ranting-ranting pohon akan berdekatan satu sama lain sehingga menghambat pertumbuhan buah jambu mete. Menanggapi sikap tersebut, Rusdyamzah mengkoodinasikan pandangan masyarakat pada waktu itu ke pihak Kesatuan Pengolaan Hutan (KPH) untuk dipertimbangkan. Sekalipun tidak mendapat respon seperti yang diharapkan, ia tetap mengarahkan masyarakat untuk melakukan penanaman sesuai yang diinginkan masyarakat.



sumber:eLSIM Doc.

Sikap yang sama juga diterapkan pada ketentuan skema penanaman yang mengharuskan lahan ditanami 70% persen tanaman kayu (jati)

dan 30% tanaman MPTS. Kondisi tersebut dianggapnya tidak begitu menguntungkan masyarakat dan tidak sejalan dengan konsep “masyarakat sejahtera, hutan lestari”. Menurutnya bahwa jika mayoritas lahan ditanami oleh tanaman jati maka kedepannya, sangat sulit bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan hasil tanam mereka, sebab untuk mendapatkan akses penebangan kayu adalah suatu perkara yang sulit karena harus berurusan dengan birokrasi yang panjang dan sulit. Baginya, yang diperlukan bagi masyarakat saat ini ialah hasil, sebab masyarakat saat itu sedang didera oleh keraguan, sehingga hasil tanam merupakan sebuah jawaban bagi harapan masyarakat terhadap berbagai ketidakpastian yang menghantui masyarakat pada masa itu.

Satuan Pemadam Kebakaran, Bekerja Kolektif Lebih Efektif

Begitu banyak masyarakat yang kurang acuh mengurus lahan yang telah diberikan, namun di satu sisi juga begitu banyak orang-orang bertindak acuh terhadap program ini. Terutama untuk mengubah hamparan padang ilalang ini menjadi hutan, dimana salah satu masalah klasik yang perlu diselesaikan pada waktu itu ialah masalah kebakaran hutan. Pembentukan satuan pemadam kebakaran oleh masing-masing KTH yang lahannya sangat rawan terkena musibah kebakaran pun ditempuh. Satuan ini bertindak secara kolektif dengan aktif melakukan patroli dan membuat sekat-sekat bakar, yakni suatu metode untuk mencegah api menyebar. Selain membentuk satuan pemadam kebakaran, para anggota KTH juga merubah metode pembukaan lahan yang dulunya dilakukan dengan cara membakar, menjadi metode penyemprotan menggunakan pestisida.

Penetapan Kawasan Hutan Kemasyarakatan Mattirotasi

Pada 9 Desember 2010 berdasarkan SK 679/Menhut-II/2010 yang menetapkan luas Area Kerja HKM Mattirotasi. Hal ini dilatarbelakangi oleh kondisi hutan Mattirotasi pada masa itu telah dapat dikategorikan layak untuk ditetapkan sebagai wilayah HKM. Berdasarkan hasil observasi,

kawasan hutan ini memenuhi unsur-unsur yang wajib dipenuhi sebagai syarat untuk menjadi HKM yaitu berhutan dan adanya aktivitas dalam kawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

Dalam rangka untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pengelolaan lahan/pemanfaatan kawasan hutan, maka pada tahun 2007 sampai 2011 terdapat beberapa perubahan kebijakan yang dikeluarkan melalui peraturan Menteri Kehutanan yang salah satu substansinya ialah berupaya untuk menyempurnakan kebijakan yang ada sebelumnya yang mengatur hal-hal terkait pengelolaan Hutan Kemasyarakatan. Kebijakan ini mengatur beberapa hal terkait akses pemanfaatan hutan termasuk tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKM). IUPHKM bagi wilayah HKM Mattirotasi ditetapkan pada 27 Desember 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidenreng Rappang. Akses terhadap kawasan hutan tidak hanya untuk skema HKM, tahun 2015 Desa Mattirotasi kemudian diberkahi dengan keluarnya Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD). Dikeluarkannya izin pemanfaatan lahan HKM dan HD merupakan suatu jawaban dari kerja keras yang selama ini masyarakat telah lakukan demi mendorong terciptanya kondisi hutan lestari dan masyarakat sejahtera.

BAGIAN IV

Hak Akses Atas Hutan

“Berbicara mengenai ketergantungan terhadap hutan, semua orang akan sepakat jika maksud dari ketergantungan tersebut adalah adanya interaksi antara manusia dan hutan dengan jangka waktu yang cukup lama dalam memanfaatkan hasil hutan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.”

“

Mengingat begitu banyaknya masyarakat Indonesia yang menggantungkan hidupnya atas hasil hutan, maka selayaknyalah pemerintah memperhatikan kondisi tersebut dengan memberikan pembinaan kepada masyarakat yang berada di sekitar kawasan ataupun yang berada dalam kawasan hutan untuk memanfaatkan hasilnya dengan tetap menjaga kelestariannya demi keberlangsungan hutan untuk generasi selanjutnya.

Skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat serta Kemitraan Kehutanan merupakan *role model* pengelolaan hutan yang masuk dalam payung hukum perhutanan sosial yang berfungsi sebagai jembatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terbatas atas pemanfaatan hasil hutan. Kebijakan ini hadir sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat disekitar kawasan dan dalam kawasan hutan demi menghadirkan kehidupan yang sejahtera dan tentunya juga tetap menjaga kelestarian hutan.

Mattirotasi salah satu desa di Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) yang merupakan salah satu lokasi pertama penerapan HKm di Sulawesi Selatan melalui pilot project HKm tahun 1999. Muharam menjelaskan terkait awal mula pelaksanaan proyek ini, beliau menceritakan “Pertama ada dari Unhas bertindak sebagai perencana, ada beberapa orang yang terlibat dari Lembaga pengabdian masyarakat. Awalnya itu perencanaan di Sidrap itu dari sekian banyak lokasi yang kita tunjukkan, Mattirotasi yang terpilih.

Dari cerita Muharam di atas, yang menjadi perhatian menarik adalah alasan mengenai penetapan Desa Mattirotasi sebagai lokasi yang cocok untuk penerapan HKm. Muharam menuturkan “adapun alasannya itu adalah, yang pertama masyarakat sudah ada dalam kawasan kemudian ketergantungan masyarakat terhadap kawasan itu cukup tinggi”.

Berbicara mengenai ketergantungan terhadap hutan, semua orang akan sepakat jika maksud dari ketergantungan tersebut adalah adanya interaksi antara manusia dan hutan dengan jangka waktu yang cukup lama dalam memanfaatkan hasil hutan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

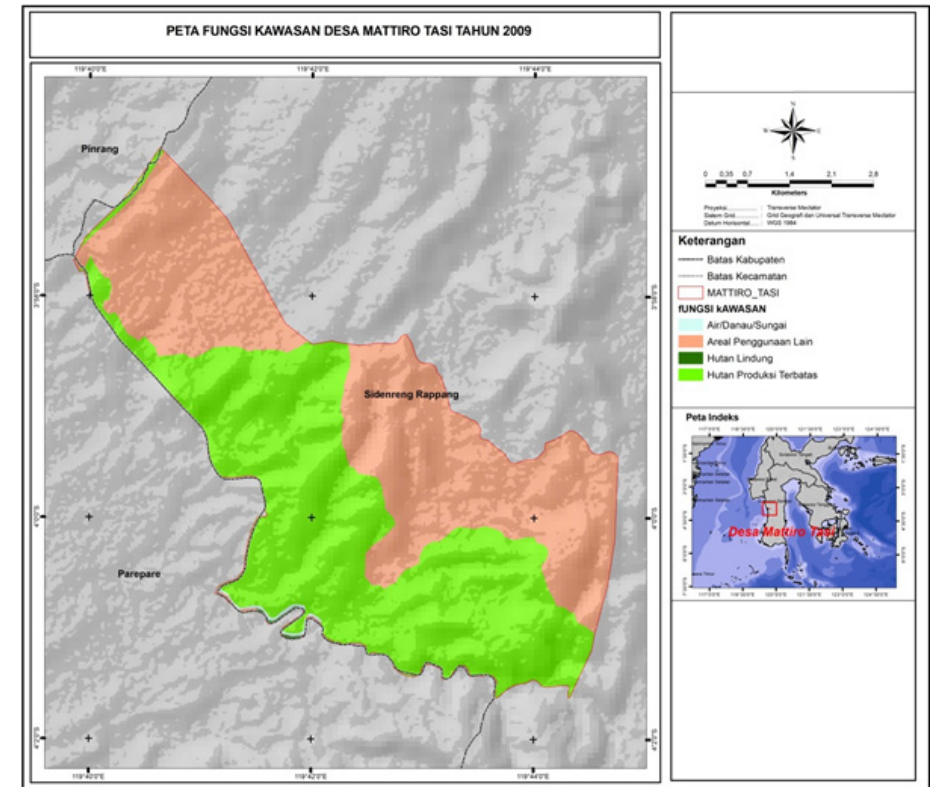
Interaksi antara manusia dan hutan dalam konteks Desa Mattirotasi telah terjalin sangat lama, terbukti dengan adanya dua perkampungan yang berada di dalam kawasan hutan, yaitu kampung Atakae dan Tonronge. Masyarakat Kampung Atakae dan Tonronge telah lama menjalin interaksi dengan hutan, meskipun awal mulanya masyarakat disana berinteraksi dengan hutan baru sekedar menjadikan hutan sebagai tempat tinggal untuk melindungi diri dari serbuan tentara pemberontak pada masa awal kemerdekaan.

Hal itu seperti yang dikatakan Mardianto, “dulu waktu masih jaman pemberontakan di Wattang Pulu Daerah Bacukiki itu orang-orang masih ditangkap. *Pas* orang-orang tua kita menyingkir ke sini. Ternyata aman*ki*, akhirnya mereka menetap dan tinggalmi sampai sekarang karena aman”.

Dengan kondisi tersebut akhirnya memaksa masyarakat memanfaatkan kawasan disana untuk mengelolanya dengan cara menggarap untuk ditanami demi keperluan hidup sehari-hari. Tanaman yang awalnya ditanami adalah jambu mete, meskipun awalnya selain memanfaatkannya sebagai kebutuhan hidup, masyarakat juga berfikir bahwa suatu saat kawasan tersebut akan semakin rimbun jika ditanami oleh jambu mete sehingga keberadaan mereka akan semakin terlindungi dari ancaman para pemberontak yang sewaktu-waktu akan menghampiri mereka.

Untuk itulah dengan latar sejarah yang jelas mengenai keterangan masyarakat terhadap kawasan hutan menjadikan penilaian untuk Desa Mattirotasi sebagai kawasan yang cocok penerapan HKm melalui pilot project pada tahun 1999 yang dijalankan oleh OECF.

Setelah penentuan lokasi dan telah disetujui oleh Meteri Kehutanan pada saat itu, akhirnya dilakukan pemetaan batas-batas lokasi yang masuk dalam kawasan dengan luas wilayah 1.000 Ha. Kawasan hutan yang begitu luas tentunya membutuhkan keterlibatan masyarakat yang cukup besar, apalagi fakta yang terjadi selama ini bahwa kebakaran di wilayah ini bukan hanya disebabkan oleh alam, tetapi juga manusia memiliki kontribusi terhadap kebakaran tersebut. Hal itu menunjuk pada aktivitas pembakaran lahan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang akan membuka areal pertanian.



Untuk itu, sosialisasi memang harus se-efektif mungkin dilakukan untuk memberikan penjelasan terkait program HKm serta memahami bahwa kegiatan pembakaran memiliki dampak yang buruk bagi alam dan tentunya juga kesehatan akibat dari gempulan asap hasil kebakaran. Muharam orang yang aktif melakukan pendampingan melalui *NGO* Agrobitema menuturkan bahwa “Kami yang dari *NGO* bidang pendampingan, melaksanakan kegiatan ini adalah awalnya dulu sosialisasi terus dan persiapan kelembagaan masyarakat yang akan mengelola”

Pria 49 tahun tersebut juga menjelaskan mengenai penekanannya saat itu, bahwa dalam pengelolaan hutan berkelanjutan dengan menggunakan skema HKm masyarakat diajak membentuk kelompok, sebab yang akan diperhatikan terlebih dahulu adalah persiapan kelembagaan bukan

individu personal masyarakat. Selain itu, adanya kelembagaan juga merupakan salah satu persyaratan bagi masyarakat yang ingin terlibat dalam pengelolaan HKm.

Berdasarkan kondisi wilayah Desa Mattirotasi dimana lokasi perkampungan yang ada di dalamnya terpisah-pisah, sehingga pembagian lokasi untuk kelompok dibagi berdasarkan 3 zona. Zona 1 melingkupi ibukota Desa Mattirotasi, zona 2 melingkupi Kampung Paberessenge dan terakhir zona 3 untuk memfasilitasi kelompok yang berada di Perkampungan Atakae dan Tonronge. Alasan dari pembagian zona tersebut adalah agar setiap kelompok bisa memantau dengan mudah lokasi yang telah diberikan dan juga mempermudah anggota kelompok dalam mengelola lahan masing-masing karena jarak tempuh dari tempat tinggal masyarakat dengan lahan yang diberikan tidak membutuhkan waktu yang lama. Dengan kata lain bahwa tujuan pembagian zona tersebut adalah untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan perencanaan terhadap pengelolaan lahan yang telah diberikan, dikarenakan masyarakat telah memahami mengenai kondisi lahan yang ada disekitar tempat tinggal atau perkampungan mereka.

Tidak hanya sampai disitu, upaya untuk mengajak masyarakat agar memiliki kepedulian terhadap wilayah HKm tidak hanya sampai pada sosialisasi dan pendampingan masyarakat terkait pembentukan kelembagaan. Upaya lain yang dilakukan setelah tahap sosialisasi adalah memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat tentang budidaya jenis-jenis tanaman yang telah ditentukan, termasuk pola tanam. Harapannya adalah kedepan masyarakat memiliki kemampuan dan kepercayaan diri dalam mengelola areal HKm.

Meskipun begitu, pria yang memiliki dua orang anak ini mengakui banyak tantangan yang ia hadapi dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendamping saat itu. Salah satunya adalah adanya sebagian orang yang tetap menolak, bahwa mereka memiliki lokasi secara pribadi yang saat itu telah diklaim sebagai kawasan HKm.

Bergabungnya masyarakat dalam pengelolaan HKm pada akhirnya tetap diambil mengikuti apa yang telah menjadi ketentuan. Mas-

asyarakat membentuk kelompok sebagai syarat bagi keterlibatan mereka dalam mengelola lahan HKm. Pilihan tersebut dipilih masyarakat karena memang tidak ada dasar yang mampu menguatkan alasan mereka dalam mengelola lahan yang telah menjadi warisan dari para orang tua mereka.

Tetapi pada kenyataannya meskipun masyarakat yang telah memiliki hak akses atas hutan, khusus untuk masyarakat Atakae dan Tonronge tetap tidak bisa memiliki kewenangan dalam mengelola lahan yang telah diberikan melalui skema HKm, misalnya seperti penebangan pohon. Penebangan pohon (jati dan jambu mete) sendiri sebenarnya tidak memiliki tujuan untuk mengalih fungsikan lahan menjadi lahan pertanian. Alasan masyarakat melakukan penebangan khusus tanaman jambu mete yaitu untuk melakukan peremajaan, karena dianggap pohon jambu mete yang ada saat ini tidak produktif lagi sebab sebagian besar jambu mete yang ada di Kampung Atakae dan Tonronge merupakan peninggalan dari para orang tua masyarakat disana.

Padahal menurut Bapak Mardianto “tidak semua pemerintah yang tanam itu pak, karena seingat saya sebelum dijadikan ini kawasan, orang-orang tua kami sudah tanam jati. Kentara itu kalau jati yang ditanam orang tua kita besar-besar batangnya. Saya ingat sekali itu orang tua tanam jati masih cangkul na gunakan untuk gali itu tanah buat tanam jati dan buat pagar-pagarnya. Tidak ada biaya pemerintah dia pakai. Tapi tetapji dilarang juga, karena masuk katanya wilayah kawasan ini tanamannya orang tua kami”.

Dari keterbatasan itu sehingga berdampak pada semakin berkurangnya jumlah penduduk yang ada di perkampungan tersebut. Mardianto mengungkapkan “banyak *mi* yang sudah pergi tinggalkan ini kampung. Saudara saya itu sudah pergi dari sini di Parepare dia di kampung istrinya tinggal. Mau tinggal tapi tidak ada yang bisa dikerja. Mau menanam tapi ditutupi semua *mi* jati. Jadi masalah memang jati di sini. Sudah mati mau diperbaiki tapi dilarang *ki*. Saudara-saudara saya sudah paksa saya untuk tinggalkan ini kampung. Katanya tidak bisa hidup orang disini. Tidak ada pekerjaan”.

Tetapi Bapak Mardianto tetap memilih tinggal disini karena alasan “ya, karena dari nenek-neneknya kami di sini hidup bercocok tanam. Ya ini tanah dan kampung kami. Tidak mungkin kami tinggalkan. Kehidupan juga di luar sana semakin susah, apa bekalnya kami. Kami cuman punya satu, ya punya kampung. Nenek-nenek kami sudah wariskan ini sama kita”.

Pelarangan penebangan pohon meskipun itu penebangan pohon jambu mete untuk peremajaan, tidak saja berlaku untuk dua perkampungan di atas, tetapi aturan itu menysasar untuk keseluruhan masyarakat yang tergabung dalam KTH HKm yang ada di Desa Mattirotasi.

Selain keluhan di atas, masyarakat Atakae dan Tonronge juga memiliki keluhan mengenai patok penetapan areal HKm yang dimana lahan yang telah diwariskan oleh para orang tua mereka juga dinyatakan sebagai areal HKm. Menurut mereka bahwa masyarakat yang berada di Atakae dan Tonronge merasa telah ditipu terkait penempatan patok tersebut. Seperti perkataan Mardianto, “itu caranya dulu orang-orang mematok seperti penipu. Dia tipu masyarakat semua. Masalahnya orang tua dulu bertanya untuk apa itu patok. Alasannya mereka dulu katanya untuk patok perbatasan Parepare dan Sidrap. Ternyata patok kawasan. Kan orang tua kami dulu tidak ada sekolahnya. Jadi tertipu semua”.

Penempatan patok kawasan tersebut merupakan suatu tindakan yang telah berdampak pada terbatasnya aktivitas masyarakat dalam mengelola lahan yang ada saat ini. Meskipun begitu, penetapan patok kawasan tersebut adalah sebagai bentuk kekhawatiran pemerintah untuk mengantisipasi proses transaksi jual beli lahan yang berakhir pada tindakan eksploitasi yang tidak memikirkan tentang dampak lingkungan maupun perekonomian masyarakat, sebagaimana yang pernah terjadi sebelumnya dalam pemanfaatan kawasan sebagai lokasi ternak oleh beberapa pengusaha yang memiliki modal besar.

Kekhawatiran pemerintah saat itu dalam mengantisipasi proses transaksi jual beli lahan sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Kepala Dusun Pabberesenge saat bersama-sama mengunjungi Kampung Atakae, “adaji juga baiknya. Karna kalau bebas ki juga banyak orang yang naik ke sini pergi beli tanah. Tidak seperti saat ini, orang-orang tidak bisa gunakan

tidak bisa juga dibeli”.

Melihat kenyataan tersebut, sekiranya pemerintah harus memperhatikan betul kondisi masyarakat yang ada di Desa Mattirotasi. Penafsiran atas aturan larangan penebangan terhadap pohon harus diselaraskan dengan kondisi yang dialami oleh masyarakat, dengan kata lain pihak kehutanan harus memperhatikan kondisi masyarakat jika menerapkan aturan ini. jika melihat kasus di atas sekiranya aturan tersebut memperbolehkan masyarakat untuk melakukan penebangan pohon, meskipun konsekuensinya harus membutuhkan waktu beberapa tahun untuk mengembalikan fungsinya.

Terkait kasus yaang dialami oleh masyarakat Atakae dan Tonronge ini juga harus membutuhkan keseriusan pemerintah dalam memfasilitasi masyarakat demi menjaga kelestarian apa yang telah menjadi warisan masyarakat disana. Jika melihat jargon perhutanan sosial yaitu “masyarakat sejahtera, hutan lestari” maka pemberdayaan yang akan dilakukan di dua perkampungan tersebut harus mengarahkan masyarakat untuk tetap mempertahankan warisan kebudayaan mereka sebagai kearifan lokal Desa Mattirotasi.

BAGIAN V

Pengelolaan Agroforestry Kawasan Hutan Pabbaressengeng

“Pemerintah tidak hanya memandang hutan sebagai penopang lingkungan secara ekologis, namun lebih dari itu hutan juga merupakan elemen penopang ekonomi masyarakat yang bermukim disekitar hutan.”

Pengelolaan HKm oleh masyarakat Desa Mattirotasi telah berlangsung cukup lama. Berlangsung sejak tahun 1999 dan berjalan efektif pada tahun 2001 hingga sekarang. Kawasan seluas 970.22 Ha ini merupakan kawasan hutan produksi terbatas yang sebagian besar dipenuhi oleh tanaman jati, yakni sekitar 70% dari keseluruhan luas kawasan. Mayoritas masyarakat yang bermukim di Desa Mattirotasi menggantungkan sumber kehidupannya dari pemanfaatan hasil hutan di wilayah tersebut.

Pada bab sebelumnya telah dibahas bahwa salah satu ancaman besar di wilayah HKm Mattirotasi ialah potensi kebakaran lahan yang begitu besar sehingga tanaman jati pada kawasan ini berfungsi sebagai tanaman pionir yang tahan kebakaran dikarenakan kulit kayunya tidak tipis sehingga sulit dimakan api. Selain manfaat secara ekologis, disatu sisi tanaman jati juga memiliki manfaat untuk menopang perekonomian masyarakat sekitar, sebab tanaman jati merupakan jenis pohon penghasil kayu bermutu tinggi.

Tingginya tingkat ketergantungan masyarakat sekitar terhadap hasil hutan, tidak serta merta membuat pemerintah begitu mudah memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) di wilayah ini. Sebab, menurut Andi Arman, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bila, bahwa ada hal yang perlu dipertimbangkan pada kasus ini, yakni fungsi jati sebagai penopang kelestarian ekosistem hutan. Penebangan jati yang tak terkendali dapat menimbulkan kerusakan hutan yang cukup serius. Penebangan jati sama saja mengubah wilayah mattirotasi kembali menjadi lahan kritis, sehingga pada waktu jangka panjang akan berakibat buruk pula pada penghidupan masyarakat sekitar baik secara ekologi maupun sosial ekonomi.

Penetapan kawasan mattirotasi sebagai areal HKm merupakan suatu praktik yang berlandaskan dari cara pandang baru dalam melihat praktik pengelolaan hutan. Pemerintah tidak hanya memandang hutan sebagai penopang lingkungan secara ekologis, namun lebih dari itu hutan juga merupakan elemen penopang ekonomi masyarakat yang bermukim disekitar hutan. Sehingga dibutuhkan suatu praktik yang dapat menjadi solusi dalam polemik ini.

Sejalan dengan semangat perhutanan sosial, yakni masyarakat sejahtera hutan lestari, pengelolaan hutan berbasis agroforestry adalah salah satu solusi yang dapat diterapkan. Agroforestry adalah suatu konsep yang memadukan antara pengelolaan hutan dan pertanian kebun di bawah tegakan pohon yang berbaris di hutan. Pada praktik ini, ekosistem hutan tetap dapat dipertahankan serta tetap mengakomodasi penghidupan (ekonomi) masyarakat sekitar.

Tanaman jati merupakan tanaman yang dominan tumbuh di areal HKm Mattirotasi namun terdapat pula tanaman jambu mete dan tanaman kemiri di areal ini. Penanaman MPTS (*Multi Purpose Tree Spesies*) seperti jambu mete dan kemiri adalah bentuk praktik agroforestry yang telah lama berkembang di wilayah ini. Bahkan sebelum kawasan hutan ini mendapatkan izin HKm, masyarakat di Kampung Tonronge dan Kampung Attakae, dua perkampungan terpencil di Desa Mattirotasi sejak jauh hari telah menanam jambu mete. Begitu pula tanaman kemiri yang sedari dulu telah dibudidayakan oleh masyarakat di Kampung Kamirie. Sebagaimana asal usul nama Kampung Kamirie diambil dari kondisi setempat yang memang sedari dulu sudah dipadati oleh pohon kemiri.

Praktik *agroforestry* dengan memanfaatkan hasil hutan dari pohon yang dapat menghasilkan buah merupakan suatu praktik yang sudah lama terjadi pada wilayah ini. Pengalaman tersebut telah membangun suatu pengetahuan lokal masyarakat tentang bagaimana praktik tanam yang efektif. Salah satu pengetahuan lokal masyarakat ialah terkait pemilihan bibit. Hal tersebut berlaku untuk tanaman jambu mete dan kemiri. Keputusan memilih bibit merupakan hal yang sangat vital dari praktik tanam. Masyarakat sekitar mengistilahkan bahwa ada jenis bibit jantan dan ada jenis bibit betina. Bibit betina merupakan bibit yang pada sisi tertentu ditemukan sedikit garis pembelah, yang jika ditanam dapat tumbuh dengan memberi hasil buah yang subur, sedangkan bibit jantan merupakan bibit yang dapat tumbuh namun tidak berbuah subur. Berdasarkan data di lapangan ditemukan satu pohon di Dusun Kamirie yang tumbuh besar berbunga namun tidak memiliki buah, menurut Jumardi, Ketua KTH Sipakatu II bahwa pohon itu merupakan pohon yang tidak sengaja tumbuh yang kemungkinan besar ditanam menggunakan bibit jantan. Sedangkan

tanaman lain yang dapat tumbuh dengan buah kemiri yang melimpah merupakan pohon-pohon yang ditanam oleh warga sekitar dengan memperhatikan jenis bibitnya, yaitu menggunakan bibit betina.

Selain penentuan jenis bibit yang akan berdampak pada hasil buah, masyarakat Mattirotasi juga meyakini bahwa jarak tanam yang diterapkan juga merupakan salah satu faktor yang menentukan hasil buah jambu mete. Jarak tanam yang saat ini diterapkan oleh masyarakat merupakan hasil pengamatan yang dilakukan selama beberapa tahun dalam melihat jumlah hasil buah. Masyarakat yang telah sadar mengenai potensi hasil buah yang lebih banyak dengan menggunakan jarak tanam yang jauh, akhirnya menerapkan jarak 10x10 meter sebagai perantara antara pohon satu dengan yang lainnya.



sumber:eLSIM Doc.

Penerapan jarak tanam yang begitu lebar untuk mengharapkan hasil buah yang maksimal, juga telah mendorong masyarakat sekitar itu menerapkan praktik agroforestry model lain di wilayah ini yang dikenal dengan istilah praktik tanam sela. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ilham MK, Ketua KTH Maminasae, "sebelum jadi HKm ini orang sini cuman

bertani sama berkebun ji kerjanya, sehingga pas HKm ada beberapa yang masih bertani kalau lagi ada air (musim hujan), dan sekarang juga lagi ramai orang-orang tanam jagung, isitilahnya di sini tamanan sela”.

Praktik tanam sela merupakan praktik yang belakangan ini sedang dikembangkan oleh masyarakat dengan memanfaatkan tepian pohon sebagai lahan tanam. Ada beberapa komoditi tanam sela yang diusahakan ditempat ini. Ilham MK, mengungkapkan bahwa: “karena ada *mi* pabrik yang siap menampung hasil panen masyarakat di luar, masyarakat saat ini lagi ramai tanam jagung soalnya dekat mi pasarnya. Tapi bukan di sawah, di kebun mereka tanam, bercampur dengan pohon mete dan pohon jati”.



sumber:eLSIM Doc.

Selain jagung, komoditi tanam sela yang yang diusahakan di kawasan ini ialah kunyit. Berdasarkan keterangan dari Ullang, Ketua KTH Massumpololoe menyatakan bahwa “masyarakat yang menjadi anggota kelompoknya selain menanam mete, mereka juga menanam kunyit”.

Berada di kawasan yang tidak memiliki sumber air yang cukup, masyarakat Mattirotasi tidak dapat mengusahakan pertanian sepanjang

tahun. Beberapa lahan milik pribadi yang letaknya berada dekat dengan wilayah HKm, masyarakat mengusahakan pertanian dengan menanam beras pada saat musim hujan datang. Masyarakat mengenal praktik ini dengan istilah “sawah tadah hujan”. Namun hasil yang diperoleh dari praktik ini tidak begitu mampu menutupi kebutuhan beras masyarakat sekitar, sebab luas lahan yang tak begitu besar dan pada kondisi tertentu seringkali terjadi kegagalan panen.

Kondisi lingkungan Mattirotasi yang tidak memiliki sumber pengairan yang cukup untuk mengusahakan pertanian sawah, menyebabkan pemanfaatan hasil hutan dengan praktik agroforestry merupakan satu-satunya jalan untuk menopang perenoman bagi masyarakat sekitar yang selama ini hanya menggantungkan penghidupannya di kawasan ini. Penerapan praktik agroforestry telah menjadi penyelamat ditengah pertentangan yang terjadi antara hutan dan masyarakat, dengan memberi sumber penghidupan kepada masyarakat dan tetap menjaga kelestarian hutan dengan tidak menebangnya. Hasil tersebut sejalan dengan semangat perhutanan sosial, yakni “masyarakat sejahtera, hutan lestari”.

BAGIAN VI

Jambu Mete, Sebuah Pilihan Menuju Kesejahteraan?

“Indonesia adalah salah satu negara yang menjadi pusat dapur untuk komoditi jambu mete dunia. Pusat komoditi jambu mete di Indonesia tersebar di beberapa daerah, yakni Sultra, Sulsel, Lombok, Flores dan Sumbawa serta Jawa-Madura.

”

Masuknya jambu mete dalam perdagangan komoditas internasional, membawa angin segar bagi masyarakat yang telah menghibahkan sebagian dari lahan perkebunan atau bahkan seluruhnya untuk ditanami tanaman jambu mete. Apalagi sekarang dengan melihat harga dari komoditi ini yang berada di bawah vanili maka tentunya akan semakin banyak orang yang akan fokus untuk membudidayakan jambu mete sebagai pilihan untuk menuju titik kesejahteraan.

Saat ini, Indonesia belum mampu mengolah jambu mete sebagai bahan dasar dalam menghasilkan produk olahan baru. Permintaan dalam negeri yang terjadi hanya untuk memenuhi kebutuhan industri rumah makan yang ada di kota-kota besar Indonesia. Sehingga hal itu menjadikan Indonesia sebagai negara pengeksport jambu mete dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara pemasok kebutuhan jambu mete di beberapa negara di dunia. Pada tahun 2014 lima negara teratas yang menjadi pasar untuk komoditi jambu mete Indonesia adalah Amerika yang berada di posisi pertama, disusul oleh negara Belanda, selanjutnya untuk posisi ke-3 ditempati oleh negara Vietnam, untuk posisi ke-4 dan 5 ditempati oleh India dan Jerman.

Indonesia adalah salah satu negara yang menjadi pusat dapur untuk komoditi jambu mete dunia. Pusat komoditi jambu mete di Indonesia tersebar di beberapa daerah, yakni Sultra, Sulsel, Lombok, Flores dan Sumbawa serta Jawa-Madura. Yang dimana jika dirata-ratakan total produksi nasional dari semua daerah penghasil jambu mete ini mencapai angka 25%. Produksi mete Indonesia dalam skala nasional berada di kisaran 95.000 ton per tahun¹⁰.

Secara kualitas Indonesia juga telah menjadi penghasil jambu mete dengan kualitas terbaik, persebarannyaapun mengikuti daerah yang menjadikan jambu mete sebagai komoditi utama dalam lahan perkebunan, salah satunya adalah daerah Sulawesi Selatan yang terletak di Desa Mattirotasi.

Desa Mattirotasi merupakan daerah penghasil jambu mete terbesar di Sulawesi Selatan. Masyarakat desa Mattirotasi telah lama berk-

¹⁰ Edi Purwanto;Perdagangan Mete, Kesejahteraan Petani dan Pelestarian Lingkungan

enalan dengan jambu mete, meskipun pada awalnya pemanfaatan jambu mete hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Kesadaran akan betapa berharganya jambu mete baru mulai lahir di akhir dekade 90-an dan di awal tahun 2000-an setelah para pengumpul dari luar desa mulai memperkenalkan jambu mete sebagai komoditi yang memiliki nilai tinggi.

Perkenalan pertama antara masyarakat dengan jambu mete dimulai sejak saat Kemerdekaan Indonesia baru saja lahir. Jambu mete sendiri merupakan tanaman yang cukup adaptif atas segala kondisi cuaca, sehingga kondisi tersebut membuat jambu mete mudah untuk tumbuh di daerah Mattirotasi. Mengingat daerah Mattirotasi sebagian besar bahkan hampir seluruh wilayahnya merupakan daerah kering dan tandus sehingga hanya tanaman jambu mete dan sejenisnya yang memungkinkan untuk tumbuh.



sumber:eLSIM Doc.

Jambu mete selain memiliki prospek ekonomi, juga memiliki manfaat lain terkait perannya sebagai tanaman yang memiliki kemampuan *hydraulic lift*. Akibat kemampuan tersebut maka menjadikan jambu mete

mudah untuk tumbuh karena mampu beradaptasi pada kondisi daerah kering. Selain itu, akibat adanya kemampuan *hydraulic lift*, jambu mete juga mampu memberikan kehidupan bagi tanaman yang pada dasarnya membutuhkan air yang cukup untuk berkembang yang tumbuh disekitarnya.

Selain memiliki nilai tinggi untuk membantu perekonomian masyarakat, alasan lain untuk menjadikan jambu mete sebagai komoditi andalan bagi desa Mattirotasi adalah karena kemampuannya yang dapat bertahan hidup dan berkembang meskipun pada saat air tanah berkurang akibat dari kondisi geografis Mattirotasi yang diperparah lagi oleh musim kemarau. Kemampuan untuk membantu tanaman lain agar dapat bertahan dan tumbuh dalam kondisi musim kemarau, dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menanamnya dengan tanaman lain di sela-sela pohon jambu.

Dalam pemanfaatannya, masyarakat melaksanakannya dalam dua fase. Pertama ketika masyarakat baru saja menanam jambu mete, lahan yang tercipta dari jarak tanam jambu mete akan dimanfaatkan untuk ditanami jagung. Selanjutnya untuk fase kedua adalah ketika pohon jambu mete telah dewasa. Dalam fase kedua ini jagung yang sebelumnya sebagai tanaman opsional untuk memanfaatkan lahan yang tercipta dari jarak tanam jambu mete, diganti oleh tanaman lain seperti kunyit, jahe, lengkuas dan tanaman-tanaman lain yang berasal dari jenis yang sama. Peralihan fase itu terjadi ketika pohon jambu mete telah dewasa yang memungkinkan jagung tidak akan dapat tumbuh ketika ditanam berdampingan dengan jambu mete.

Jambu mete kehadirannya di Mattirotasi selain karena sejarah dukungan masyarakat dalam membetuk perkampungan, juga karena program reboisasi pemerintah pada dekade-dekade 80-an dengan menjadikan jambu mete sebagai jenis tanaman yang cocok untuk daerah ini dan juga sebagai upaya untuk membentuk kawasan konservasi. Namun dalam program tersebut metode penanaman yang dilakukan terkesan dipaksakan karena sejak awal tujuan dari program ini adalah untuk penghijauan, dimana jarak tanam yang diusulkan adalah 5X5 atau mematok perhektarnya ditanami dengan 400 pohon, sementara idealnya menurut pengalaman masyarakat adalah 100 pohon perhektar.

Kampung Tonronge, meskipun masyarakat disini lebih dulu telah berkenalan dengan jambu mete, tetapi metode terkait jarak tanam yang terjadi pada tahun akhir 90-an yang mereka warisi dari para orang tua mereka dapat terbilang masih tergolong sederhana dan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap hasil produksi.

Salim, salah seorang warga di Kampung Tonronge menjelaskan “Kalau nenek kami dulu, ditanam 10 hasilnya tentu 10. Jadi ditanam dekat-dekat. Sekarang karena melihat jambu mete sudah memiliki nilai, kami belajar untuk menanam dengan cara 10-15 meter jaraknya. Kalau nenek kami dulu jaraknya Cuma 2-3 meter”.

Dengan jarak yang seperti itu, maka ketika jambu mete telah dewasa ranting akan melebar kesamping. Itu sebabnya jarak tanam harus diukur karena ketika jarak tanam terlalu sempit akan dikhawatirkan ketika usia pohon jambu mete telah dewasa, maka ranting tiap pohon jambu akan saling mengkait ketika tertiuip angin dan mengakibatkan bunga yang ada di tiap-tiap ranting akan terjatuh. Ketika kondisi tersebut terjadi maka dampaknya adalah hasil panen masyarakat akan berkurang.

Selain jarak tanam, masyarakat disini memiliki cara tersendiri dalam menentukan bibit yang akan ditanam. Cara-cara tersebut didapatkan



sumber:eLSIM Doc.

dari para orang tua mereka yang telah lama berjibaku dengan urusan jambu mete. persoalan bibit juga inilah yang biasa menyebabkan masyarakat dan pihak kehutanan kerap bersebrangan pemikiran.

Ilham salah seorang warga kampung Pabberesenge sekaligus merupakan ketua KTH Mamminasae menyebutkan “Dulu dari kehutanan yang kasih bibit. Tapi masyarakat di sini juga punya cara, dia pilih-pilih mana biji yang bagus untuk ditanam”. Masyarakat disini kalau mau menanam, bibitnya dicari jambu yang terbelah bagian bawahnya. Itu sebagai betinanya”.

Dengan pengetahuan masyarakat yang telah turun temurun tersebut, Masyarakat Mattirotasi memiliki keyakinan bahwa bukan hanya manusia yang memiliki pembagian kelamin, tetapi tanamanpun juga memiliki pembagian jenis kelamin. Dengan memilih bibit betina maka akan berpengaruh terhadap hasil yang akan didapat masyarakat ketika jambu mete memasuki musim panen. Ibarat manusia, yang bisa melahirkan adalah manusia yang berjenis kelamin perempuan.

Terkait pengolahan jambu mete, masyarakat disini pada umumnya menjadikan jambu mete sebagai tabungan. Maksudnya adalah ketika masyarakat memiliki uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari, maka jambu mete yang mereka dapat setelah melakukan proses pemungutan dilahan perkebunan mereka akan sementara disimpan. Nanti tiba saatnya ketika masyarakat tidak lagi memiliki uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari maka jambu mete yang telah dipersiapkan untuk keadaan seperti ini akan dijual dalam bentuk biji atau telah terpisah dari cangkang akibat proses pembelahan yang masyarakat lakukan sendiri.

Kondisi tersebut tidak hanya terjadi untuk komoditi jambu mete semata, melainkan juga terjadi pada semua komoditi yang masyarakat Mattirotasi usahakan, yaitu kunyit, jahe, lengkuas dan kemiri.

Dari penjelasan sebelumnya, desa Mattirotasi adalah salah satu daerah yang menjadi penghasil jambu mete dengan kualitas terbaik. Pengakuan yang diraih oleh desa Mattirotasi sebagai desa penghasil jambu mete berkuaitas telah lama dilontarkan oleh para pembeli dari luar desa Mattirotasi.



sumber:eLSIM Doc.

“Bukan disitu. Jauh dari situ sudah ada pengakuan dari orang luar. Alasannya karena beda dengan mete yang lain, rasanya ada manis-manisnya, kemudian kepadatan isinya lebih tinggi di Sulsel. Bisa kepadatannya mencapai 30-32% kalau yang lain itu kisaran 25%”. Begitulah pernyataan Jumardi saat dikonfirmasi untuk menjelaskan terkait tanggapan dari pihak luar mengenai komoditi unggulan desa Mattirotasi.

Pengakuan bukan hanya datang dari para pengusaha yang membidangi komoditi ini,

tetapi pada tahun 2016 pemerintah Kabupaten Sidrap dalam acara tumpang sipulung telah memberikan penghargaan kepada masyarakat melalui Jumardi karena telah mengangkat nama Kabupaten Sidrap bukan hanya sebagai daerah lumbung padi di Sulawesi Selatan atau bahkan Sulawesi tetapi juga telah memberikan predikat baru sebagai daerah penghasil jambu mete berkualitas.

Dengan capaian tersebut kiranya telah menjadi sebuah motivasi besar bagi masyarakat Mattirotasi agar terus mempertahankan jambu mete sebagai komoditi unggulan desa Mattirotasi. Selain itu, pengakuan tersebut juga berdampak sampai kepada kegiatan usaha para pengumpul jambu mete, yang dimana sebelum menjual atau mengeksportnya ke nega-

ra-negara tujuan, terlebih dahulu jambu mete yang telah mereka beli dari masyarakat di luar desa Mattirotasi diantar ke Mattirotasi untuk dilakukan proses pembelahan yang digayungi sebagian besar ibu rumah tangga disana. Nanti setelah itu, kemudian jambu mete yang telah melewati proses pembelahan akan di ekspor ke negara tujuan yang tentunya juga telah membawa nama desa Mattirotasi.

BAGIAN VII

Menangkap Peluang Bisnis Jambu Mete melalui "Mete Krispy"

“Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menemukan cita rasa baru dari jambu mete yang tentunya juga memiliki nilai tinggi. Pada dasarnya tujuan dari pengolahan suatu produk adalah selain menghadirkan cita rasa baru, juga meningkatkan nilainya dari nilai dasar yang ditawarkan sebelum melewati proses pengolahan.

“

Saat ini telah banyak produk olahan baru yang berbahan dasar jambu mete. Bentuk pengolahannya pun beragam, ada yang disajikan dalam bentuk makanan, ada yang dipadukan dengan coklat dan masih banyak lagi produk olahan yang berbahan dasar jambu mete. Semua kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menemukan cita rasa baru dari jambu mete yang tentunya juga memiliki nilai tinggi. Pada dasarnya tujuan dari pengolahan suatu produk adalah selain menghadirkan cita rasa baru, juga meningkatkan nilainya dari nilai dasar yang ditawarkan sebelum melewati proses pengolahan.

Begitupun juga dengan jambu mete yang ada di desa Mattirotasi, diolah untuk meningkatkan nilai dan sekaligus memberikan dampak terhadap pendapatan masyarakat desa, yang dimana olahan jambu mete dari masyarakat Mattirotasi ini dinamai dengan mete krispy. Meskipun saat ini proses pengolahannya masih terbilang sedikit, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat kondisi tersebut akan bertambah seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat yang berminat terhadap mete krispy sebagai produk hasil olahan masyarakat Mattirotasi.

Gagasan atau ide dari pengolahan ini dihadirkan oleh Amin yang juga merupakan ketua BUMDes Mattirotasi. Amin menginisiasi beberapa orang masyarakat untuk mengolah jambu mete, pengolahan perdana terjadi sekitar tiga tahun yang lalu dan jumlah produksi yang dihasilkan sekitar 10 Kg. Maklum saja, bahwa kondisi pasar yang belum jelas sehingga mau tidak mau jumlah yang diolah hanya sebesar itu.

Ibu Hisana merupakan orang dibalik pengolahan jambu mete krispy mengaku bahwa pengolahan ini telah ia lakoni sekitar selama 3 tahun. Ibu Hisana adalah orang yang pertama diajak oleh Amin untuk membantunya dalam mengolah jambu mete menjadi mete krispy yang gurih. Kegiatan pengolahan jambu mete menjadi mete krispy ini dilakukan setiap seminggu sekali oleh ibu Hisana yaitu hari Kamis dan biasa juga dilakukannya hari Jum'at. Hari itu sengaja dipilihnya karena agar tidak terlalu lama bermalam, pasalnya hasil olahan jambu mete itu akan dibawa ke Makassar oleh Amin.

Rupanya banyak orang yang berminat kepada mete krispy. Saat ini ibu Hisana mulai meningkatkan jumlah produksinya, yang sebelumnya hanya 10 Kg kini bisa mencapai 15 bahkan 20 Kg. Dalam momen-momen tertentu, Ibu Hisana terkadang harus mempersiapkan mete krispy bahkan bisa meningkat 2 kali lipat dari hari biasanya. Momen yang dimaksud Ibu Hisana adalah momen ketika memasuki hari lebaran, karena banyak para pegawai kantor yang memesan untuk diantarkan mete krispy. Maklum banyak yang akan datang bertamu.

Ibu Hisana tidak memiliki bekal pengalaman untuk mengolah jambu mete krispy. Tetapi setelah mengiyakan ajakan dari pak Amin untuk ambil bagian dalam pengolahan mete krispy, ibu Hisana mulai belajar bagaimana cara pembuatan dari mete krispy. Ibu Hisana mengatakan "setelah memperhatikan Mudahji goreng-goreng begini". Bekalnya sebagai ibu rumah tangga memang tidak menyulitkan ibu Hisana untuk belajar membuat mete krispy, meskipun diawal ia sempat kebingungan mengenai cara pembuatannya, mungkin karena faktor namanya yang terdengar asing ditelinga ibu tiga anak ini.

Terkait waktu lama penggorengan, ibu 50 tahun tersebut mengatakan "biasanya hampir setengah jam di goreng untuk jumlah 1-1,5 Kg. Kecil apinya supaya bagus masaknyanya. Karena ini mete keras ki jadi harus kecil apinya".

Untuk bumbu dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat mete krispi, ibu tiga anak ini menyebutkan bahwa terkait bumbunya yaitu Bawang putih, gula, telur, dan bumbu dapur lainnya. Terkait bahan dasar yang perlu dipersiapkan adalah jambu mete yang telah dibelah atau yang sudah terpisah bijin dan cangkangnya, setelah itu dibersihkan lalu kemudian ditiriskan untuk menghilangkan air dari jambu mete.

Sejauh ini pasaran dari mete krispi baru sebatas Kabupaten Sidrap dan Kota Makassar. Untuk Kota Makassar Ibu Hisana menceritakan bahwa Pak Amin yang akan membawa ke toko-toko yang ada Di Makassar begitupun juga dengan kabupaten Sidrap, hanya saja kalau saat momen lebaran biasanya ibu Hisana akan turut juga membantu pak Amin untuk membawakan dan memasarkan ke kantor-kantor pemerintah daerah.

Adapun harga dari mete krispy ini, pak Amin menyebutkan bahwa Kemasannya itu 400gr kami jual 50rb. Untuk wilayah Makassar, saat ini hanya 1 toko yang mau menerima produk kami, yaitu toko unggul.



sumber:eLSIM Doc.

Pria yang pernah magang ke Jepang ini sudah sering kali memasukan produk BUMDes yang dia pimpin di toko-toko, namun karena lagi-lagi mete krispy belum menjadi produk yang diminati oleh sebagian besar masyarakat. Ia mengaku "Pernah kita coba di toko lain, yah tidak terbayar karena tidak ada pembelinya di sana, dan kita di kasih waktu cuman sedikit dan waktu saya untuk pulang balik makassar masih sedikit sekali. Pernah saya coba di maros itu, di bandara, tapi tinggal barangnya jadi rugi kami".

Pak Amin menceritakan mengenai mete krispy ini dibangun, "BUMDes itu baru ji kemarin. dua tahun lalu. Usaha saya lebih dulu. Tapi BUMDes itu pengembangan untuk desa kita. BUMDes ini kita gunakan sebagai nama untuk produk". Dengan perhatian yang serius untuk membangun desanya, pak Amin memiliki rencana yang panjang yang akan ia ambil.

Momen pembangunan PLTB, dimanfaatkan oleh pak Amin sebagai penyedia cattring. Karena beliau juga sebagai salah satu karyawan di pe-

rusahaan listrik itu, sehingga tidak terlalu mempersulit beliau untuk mengusulkan niatannya, apalagi dengan mengatas namakan BUMDes Mattirotasi. Setiap harinya pak Amin harus menyediakan kurang lebih 30 ribu makanan untuk para pekerja. Jumlah yang begitu besar untuk usaha skala BUMDes.

Setelah pembangunan PLTB rampung, cattring yang harus disediakan oleh pak Amin tidak sebesar dulu saat proses pembangunan. Saat ini hanya sekitar puluhan orang saja yang bisa disediakan cattring oleh BUMDes karena karyawan tidak sebanyak para pekerja saat proses pembangunan.

Namun, meskipun kondisi demikian terjadi, tidak membuat langkah pak Amin untuk membangun desanya terhenti. Pak Amin selaku ketua BUMDes Mattirotasi, mengetahui betul mengenai potensi di desanya. Setelah melahirkan usaha cattring dan mete krispy dengan modal dari BUMDes, saat ini pak Amin juga sedang memikirkan bagaimana membangun lokasi wisata dengan memanfaatkan kincir angin PLTB sebagai modal utama.

Selain itu, telah ada rencana pak Amin terkait buah jambu mete yang selama ini terbuang percuma, akan dicoba dimanfaatkan untuk usaha produktif masyarakat Mattirotasi. “ada pengajuan ke BPSKL untuk usaha produktif kita di sini. Alat penggorengan saya sudah usulkan kemarin supaya jambu-jambu (buah) yang terbuang sia-sia saja kemarin bisa kita buat jadi kripik. Karena sekarang yang terjual cuman bijinya, dan buahnya terbuang”.

Rencana terkait pembangunan spot wisata akan menjadikan kincir angin PLTB sebagai modal utama, selanjutnya hal itu akan dipadukan dengan potensi lain yang dimiliki oleh desa Mattirotasi. Menghayati putaran demi putaran kincir angin sambil menikmati gurihnya mete krispy bukan lagi menjadi hal yang sulit untuk ditemui.

Nggaak percaya?

Mari berkunjung ke Mattirotasi...!

BAGIAN VIII

Suatu Akhir yang Memulai

“Minimnya akses terhadap fasilitas penunjang hidup seperti listrik, jalan maupun pendidikan merupakan suatu konsekuensi yang tidak dapat lagi dihindarkan. Kondisi tersebut menyebabkan tidak ada lagi pilihan bagi masyarakat selain menggantungkan hidup pada hasil-hasil hutan.”

Hutan dan Manusia pada dasarnya menghasilkan suatu hubungan yang akan saling menopang satu sama lain. Namun kecenderungan yang terjadi adalah manusia seringkali melakukan tindakan yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah mengenai kelestarian ekosistem. Sebut saja mulai dari penebangan liar dan berbagai tindakan alih fungsi hutan (deforestasi) dan lahan, serta kebakaran hutan yang merupakan peristiwa yang seringkali dihadapi oleh masyarakat Mattirotasi.

Berbagai tindakan perusakan hutan yang dilakukan manusia telah menjadi cerita panjang dalam upaya pelestarian lingkungan. Tetapi potret pengelolaan hutan di Mattirotasi telah membuka mata penulis bahwa dari sekian banyak kemungkinan telah mewarnai hubungan yang terjalin di antara hutan dan manusia, di sisi lain terdapat pula bentuk kontradiksi yang malah merugikan manusia-manusia yang bermukim di dalam dan sekitar hutan. Praktik dan cara pandang yang hanya memperhatikan kelestarian hutan tanpa memperhatikan kesejahteraan manusia-manusia yang berada di sekitarnya merupakan bentuk kontradiksi yang di maksud.

Kemiskinan ekonomi telah menjadi kondisi yang umum ditemui pada masyarakat bermukim di sekitar hutan. Seperti yang di alami oleh masyarakat kampung Tondoronge dan kampung Attakae. Minimnya akses terhadap fasilitas penunjang hidup merupakan konsekuensi dari pilihan untuk tetap memilih tinggal di pelosok hutan, dan menjalaninya bukanlah suatu perkara mudah. Minimnya akses terhadap fasilitas penunjang hidup seperti listrik, jalan maupun pendidikan merupakan suatu konsekuensi yang tidak dapat lagi dihindarkan. Kondisi tersebut menyebabkan tidak ada lagi pilihan bagi masyarakat selain menggantungkan hidup pada hasil-hasil hutan.

Perjuangan untuk mendapatkan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan kemasyarakatan (IUPHHK-HKm) merupakan satu harapan bagi masyarakat yang lahannya telah terlanjur dipenuhi oleh tanaman kayu, seperti jati. Perjuangan untuk akses pemanfaatan kayu bukan merupakan hal yang begitu mudah untuk digapai. Oleh karena itu penting bagi masyarakat untuk menemukan solusi lain yang perlu untuk diperjuangkan. lalah pemanfaatan hasil-hasil hutan lewat praktik-praktik agroforestry pada lahan-lahan yang dominan diisi oleh tanaman jati dengan melaku-

kan praktik tanam sela, seperti jagung, kunyit dan kacang-kacangan.

Bagi masyarakat yang lahannya dominan ditumbuhi dengan tanaman jambu mete merupakan anugerah tersendiri. Sebab hasil hutan yang diperoleh, yakni kacang mete merupakan komoditas yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Sehingga begitu banyak dari mereka yang dapat keluar dari jeratan kemiskinan ekonomi yang akrab menghampiri masyarakat Mattirotasi yang dulunya merupakan kawasan tertinggal di kabupaten Sidrap.

Kehadiran Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap yang beroperasi di Kawasan Mattirotasi yang merupakan pembangkit listrik tenaga angin pertama di Indonesia dan merupakan harapan baru bagi masyarakat Mattirotasi. Desa yang dulunya sering dikeluhkan sebab seringkali menyebarkan polusi asap yang berasal dari kebakaran hutan, namun kehadiran PLTB telah merubah cara pandang masyarakat luar terhadap kawasan ini.



sumber:eLSIM Doc.

Kehadiran PLTB Sidrap telah membuka keran perekonomian setempat yang selama ini hanya bergantung pada hasil-hasil hutan. Selain telah membuka lapangan kerja bagi beberapa orang dan merangsang pertumbuhan BUMDes lewat kerjasama bisnis *Catering*, akses jalan lebar menuju PLTB telah memberi sedikit kemudahan bagi masyarakat untuk berkendara keluar masuk kawasan hutan. Akses jalan tentunya merupakan suatu rangsangan yang positif bagi masyarakat sekitar.

Kincir-kincir yang berdiri tegak di puncak-puncak perbukitan Mattirotasi merupakan anugerah keindahan bagi masyarakat Mattirotasi. Hampir setiap harinya kawasan ini didatangi oleh orang-orang yang ingin menikmati pesona kincir. Orang-orang yang datang tak pernah lupa untuk mengambil gambar untuk mengabadikan momen mereka di tempat ini. Kondisi ini tentu saja merupakan potensi baru yang mesti segera disambut oleh masyarakat sekitar dalam membangkitkan perekonomian dengan mengembangkan suatu pemanfaatan hutan berbasis ekowisata.



sumber:eLSIM Doc.

Praktik ekowisata merupakan suatu model wisata yang mengkolaborasi potensi alam dan berbagai praktik pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat lokal dan terkadang sampai melibatkan aspek pendidikan dan pelatihan di dalamnya. Ekowisata masih merupakan praktik

yang langka ditemui di kabupaten Sidrap sehingga sangat potensial untuk dikembangkan di kawasan ini.

Menyambut peluang tersebut. Amin, Ketua BUMDes Mattirotasi telah merancang suatu upaya kolektif bersama dengan masyarakat sekitar untuk menganalisis bentuk penerapan ekowisata di kawasan ini, dengan mensurvey beberapa tempat di kawasan ini yang nantinya akan ditawarkan sebagai lokasi berdirinya ekowisata.

Desain ekowisata yang diharapkan oleh masyarakat sekitar, nantinya dapat bersinergi dengan praktik-praktif pemanfaatan hasil hutan yang selama ini telah menjadi penghidupan masyarakat sekitar. Amin mengungkapkan bahwa "jika ekowisata ini terwujud, kami berharap jambu mete yang telah dikelola oleh masyarakat menjadi mete krispsi dapat dijadikan sebagai ole-ole khas dari desa ini. bagi masyarakat yang nantinya akan berkunjung". Ekowisata diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan produksi mete yang selama ini terhambat dikarenakan sulitnya menemukan pasar.

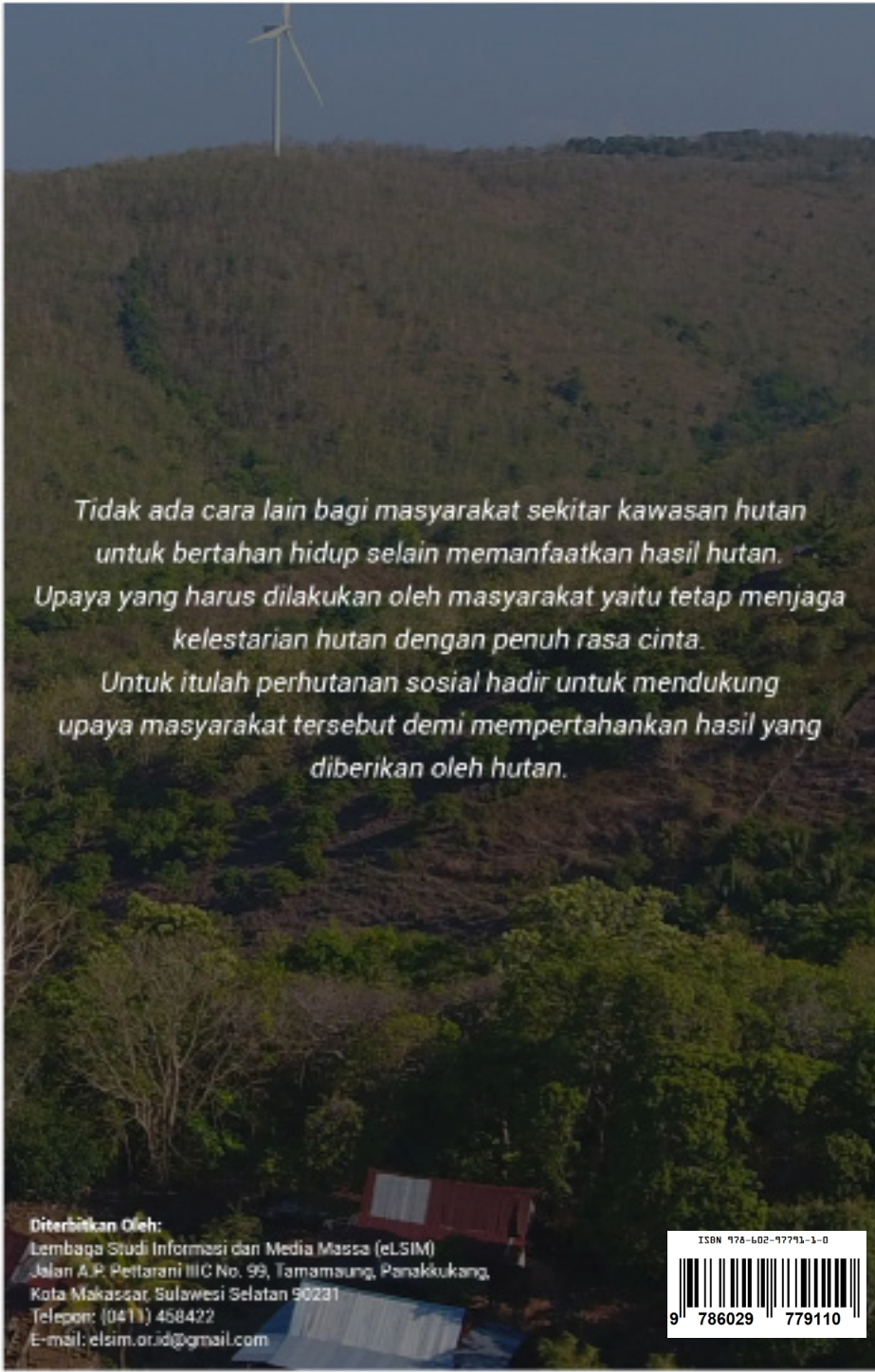
Kunjungan wisata dari berbagai kalangan tentunya akan membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, entah menyiapkan jajanan khas setempat seperti yang telah direncanakan oleh BUMdes atau lapangan kerja lain seperti wisata hutan berbasis pendidikan lingkungan dan berbagai bentuk pemanfaatan potensi wisata lainnya.

Tentu bukan suatu perkara yang mudah membangun suatu praktik pengelolaan hutan berbasis ekowisata. Diperlukan usaha-usaha keras dan kolektif oleh masyarakat sekitar serta bantuan berbagai pihak, termasuk pihak swasta, yakni PT. UPC Renewables yang selama ini beroperasi di kawasan Mattirotasi. Tanggung jawab sosial yang diwujudkan melalui dana CSR merupakan suatu peluang yang diharapkan oleh Amin dan masyarakat sekitar. Dan tentunya juga harapan akan peran pemerintah dalam mengusahakan mimpi ini dapat terwujud.

Oleh sebab itu, dengan banyaknya tantangan yang telah dihadapi maupun yang saat ini hadir sebagai pekerjaan rumah masyarakat sekitar hutan, pemerintah diharapkan mampu memberikan dukungan serta menempatkan masyarakat sebagai subyek dalam pengelolaan hutan agar

terwujudnya hutan yang lestari demi menghadirkan kondisi lingkungan yang memiliki dampak bagi kesejahteraan masyarakat hari ini dan generasi dikemudian hari.

Semoga.



*Tidak ada cara lain bagi masyarakat sekitar kawasan hutan
untuk bertahan hidup selain memanfaatkan hasil hutan.
Upaya yang harus dilakukan oleh masyarakat yaitu tetap menjaga
kelestarian hutan dengan penuh rasa cinta.*

*Untuk itulah perhutanan sosial hadir untuk mendukung
upaya masyarakat tersebut demi mempertahankan hasil yang
diberikan oleh hutan.*

Diterbitkan Oleh:

Lembaga Studi Informasi dan Media Massa (eLSIM)
Jalan A.P. Pettarani III C No. 99, Tamamsung, Panakkukang,
Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
Telepon: (0411) 458422
E-mail: elsim.or.id@gmail.com

ISBN 978-602-97793-1-0



9 786029 779110